



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI VIII DPR RI DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI
DAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
HAJI (BPKH)**

- Tahun Sidang** : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Hari, Tanggal** : Senin, 22 Mei 2023
Pukul : 13.00--18.56 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Gedung Nusantara II Lantai 1
Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
- Acara** : Pembahasan dan Masukan atas Perubahan BPIH terkait Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M
- Pimpinan Rapat** : 1. Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.(Ketua Komisi VIII DPR RI)
2. H. Marwan Dasopang (F-PKB)
- Sekretaris Rapat** : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 29 orang Anggota dari 51 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN** :
1. Dr. Ashabul Kahfi, M.Ag. (F-PAN)
2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)
3. Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-Partai Golkar)
4. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA :

**FRAKSI PARTAI DEMORASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6. I Komang Koheri, S.E.
7. Paryono, S.H., M.H.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md
9. MY Esti Wijayati
10. Umar Bashor, S.E.
11. Ina Ammania
12. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
13. Riyanta, S.H.
14. H. Rachmat Hidayat, S.H.
15. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
16. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

17. H. John Kenedy Azis, SH., MH.
18. Mohammad Saleh, S.E.
19. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., M.M.
20. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
21. Drs. H. Hasan Basri, M.M
22. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

24. M. Husni, S.E., M.M.
25. R. Imron Amin, S.H., M.H.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. Obon Tabroni
29. Ardhya Pratiwi S., S.E., M.Sc..

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-
NASDEM)**

30. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.
31. Dra. Hj. Delmeria
32. Hj. Sri Wulan, S.E.
33. Ach. Fadil MUuzakki Syah, S.Pd.I.
34. Drs. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. M.F. Nurhuda Y.
38. H. Lukman Hakim, S.Ag

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

39. Dr. H. Achmad, M.Si.
40. Wastam, SE., SH

41.H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42.Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-
PKS)**

43.K.H. Bukhori, Lc., M.A.
44.H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
45.Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46.Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
47.Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

48.H. Mhd. Asli Chaidir, S.H.
49.H. Yandri Susanto, S.Pt.
50.Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

51.K.H. Muslich Zainal Abidin
52.H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.

Undangan

- : 1. Prof. Hilman Latief, MA, Ph.D. (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan UmrahKementerian Agama RI);
2. Fadlul Imansyah (Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji);
3. Jajaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan UmrahKementerian Agama RI;
4. Jajaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);.

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

PESERTA RAPAT:

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Selamat siang;
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Bapak Pimpinan dan;
Anggota Komisi VIII DPR RI;
Yang terhormat, Saudara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajaran;
Yang terhormat, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji beserta jajaran; dan
Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala*, karena *alhamdulillah* pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, untuk hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Sebelum acara dilanjutkan, marilah kita bersama-sama berdo'a untuk kesuksesan acara ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Berdo'a.

(PESERTA RAPAT BERDO'A)

Menurut laporan dan dari Sekretariat Komisi VIII pada hari ini Pimpinan, Anggota telah hadir secara fisik 25 Anggota, kemudian fraksi 8 fraksi, kemudian izin 14 orang dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI, hal ini berarti bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah fraksi dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Maka sesuai dengan Tatib DPR RI ayat (1) Pasal 281, kuorum telah tercapai.

Oleh karena itu atas persetujuan Dirjen PHU dan Kepala Badan Pelaksana BPKH serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DI BUKA PUKUL 14.00 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang kami hormati,

Adapun agenda rapat kita sebagai berikut:

Satu, Pengantar Ketua Rapat, sedang berlangsung;
Kemudian penjelasan Dirjen PHU dan Kepala Badan Pelaksana BPKH;
Kemudian tanya jawab;
Kemudian kesimpulan rapat;
Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?.

**(RAPAT SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya rapat kita, kita kan mulai jam 14.00 ya, kita akan akhiri pada pukul 15.30 dulu ya?.

Oke. 15.30 dulu.

**(WAKTU RAPAT DISETUJUI HINGGA PUKUL 15.30 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya, bahwa sehubungan dengan adanya tambahan kuota haji regular yang tercantum dalam sistem *e-haji* Pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 8.000 jama'ah, diusulkan adanya penambahan BPIH yang bersumber dari dana nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp13.379.436.950,82.

Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas mengenai usulan tersebut yang mencakup, apa saja rincian komponen BPIH yang diusulkan bertambah?, kemudian kebijakan persiapan terkait pengisian kuota haji regular tambahan.

Dan tidak kalah pentingnya, adalah mendengarkan masukan dari BPKH mengenai ketersediaan dana nilai manfaat yang diusulkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peningkatan besaran nilai manfaat keuangan haji pada BPIH yang terjadi akibat adanya penambahan kuota haji tersebut, perlu dibahas bersama antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sesuai dengan amanat Pasal 46 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga *Allah Subhaanahuata'aala* memberkati kita semua. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilakan kepada Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia, dan nanti akan dilanjutkan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk memberikan penjelasannya.

Saya kira ada 2 poin penting ini Pak yang paling penting kita tahu.

Yang pertama penjelasan dari Dirjen PHU, berapa sebenarnya anggaran yang diperlukan dengan penambahan kuota 8.000 ini?.

Kedua, apakah penambahan kuota 8.000 ini dapat terserap semuanya?. Karena harapan kami keputusan rapat kemarin kita berupaya semaksimal mungkin kuota 8.000 ini semuanya termanfaatkan. Jangan sampai ada yang dikembalikan.

Kedua, seperti apa kesiapan BPKH terhadap penambahan kuota 8.000 ini?. Jadi tentu kita ingin mendengarkan rasionalisasinya dan tanpa mempengaruhi keberlanjutan jama'ah haji kedepannya.

Saya kira 2 poin itu yang paling penting kami dengarkan pada hari ini. Karena pada prinsipnya rapat kemarin semua fraksi sudah menyetujui kuota tambahan 8.000 itu untuk segera dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Baiklah, kami persilakan kepada Dirjen PHU untuk memberikan penjelasan.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

Yang kami hormati, Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta;

Para pejabat Eselon II dan III di Ditjen PHU yang kami banggakan;
Yang kami hormati, Kepala BPKH beserta jajaran.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan mitigasi perhitungan kuota tambahan haji reguler tahun 1444 Hijriah-Tahun 2023 Masehi.

Sholawat serta Salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shollalloohu 'Alaihi Wasallam*, untuk keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai *yaumul akhir* nanti.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI serta Hadirin sekalian yang saya hormati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, berdasarkan pembagian alokasinya, pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan alokasi kuota jama'ah haji reguler dan jama'ah haji khusus yang diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia sebesar 221.000 kuota.

Kuota jama'ah haji reguler sebanyak 203.320 jama'ah, yang terdiri dari 190.897 jama'ah haji, 10.166 prioritas usia lanjut, 685 pimpinan atau pembimbing KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah.

Sementara itu untuk kuota jama'ah haji khusus sebanyak 17.680 jama'ah yang terdiri dari 16.305 jama'ah haji dan 1.375 petugas haji khusus.

Dapat kami sampaikan, bahwa untuk kuota jama'ah haji reguler telah dilakukan pelunasan sejak tanggal 11 April sampai dengan 19 Mei tahun 2023. Selama rentang waktu tersebut diperoleh data jama'ah haji yang telah melunasi sebanyak 179.044 jama'ah, dan cadangan yang telah melunasi sebanyak 29.775 jama'ah, sehingga periode pelunasan berakhir. Sisa kuota yang belum melunasi sebanyak 24.276 jama'ah.

Selanjutnya, untuk mengisi sisa kuota yang belum melunasi tersebut akan di isi oleh jama'ah haji cadangan yang telah melunasi sebanyak 24.276 orang, sehingga terdapat 5.765 jama'ah yang statusnya masih tetap cadangan pada kuota normal. Dari 24.276 jama'ah tersebut terdapat sisa. Ini ada beberapa provinsi yang memang tidak terpenuhi sampai cadangan pun kita gabungkan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Sumatera Utara. Yang tidak terisi kuotanya sebanyak 266 jama'ah, dan akan dibagi dengan cara sebagai berikut:

a. Sisa kuota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 190, 119 orang, dan sisa kuota Provinsi Papua sebanyak 17 orang jama'ah, diberikan ke provinsi lain yang diutamakan dalam satu embarkasi, dengan rincian sisa kuota Provinsi DKI Jakarta akan diberikan kepada Provinsi Banten sejumlah 70 jama'ah haji, yaitu 59%, dan Provinsi Lampung sejumlah 49 jama'ah haji atau 41%, dan sisa kuota Provinsi Papua diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 17 jama'ah haji;

Sisa kuota Provinsi Sumatera Utara sebanyak 130 jama'ah akan diberikan untuk 2 provinsi dengan masa tunggu terlama, dengan rincian:

- Untuk Kalimantan Selatan sebanyak 18 jama'ah haji;
- Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 112 jama'ah haji.

Berdasarkan *e-hajj* yang muncul pada tanggal 19 Mei 2023, Indonesia memperoleh kuota tambahan sebanyak 8.000 jama'ah, yang kemudian pada

tanggal tersebut muncul rincian, bahwa untuk reguler sebanyak 7.360 jama'ah, dan jama'ah haji khusus sebanyak 640 jama'ah.

Selanjutnya, kuota tambahan jama'ah haji reguler akan di isi dari jama'ah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan namun belum memperoleh kuota, yaitu sebanyak 5.765 jama'ah. Untuk sisa kuota tambahan yang belum digunakan hingga saat ini terdapat 1.595 orang jama'ah akan dibagi berdasarkan jumlah daftar tunggu pada masing-masing provinsi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, dan Hadirin yang berbahagia.

Demi memenuhi prinsip keadilan pada jama'ah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan 7.360 jama'ah diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami melakukan penyesuaian usulan anggaran kuota tambahan jama'ah haji reguler yang semula sebesar Rp313.379.436.950,82 untuk 8.000 jama'ah menjadi Rp288.312.382.288,42 untuk jama'ah, untuk tiga ribu, untuk 7.360 jama'ah haji reguler, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Asumsi dasar yang digunakan sebagaimana berikut:

a. Kurs mata uang asing yang digunakan sama dengan pada saat penetapan BPIH, yaitu 1 US Dollar bernilai Rp15.150,- dan 1 SAR sebesar Rp4.040,-.

b. Frekuensi manasik di kabupaten/kota sebanyak 2 kali, dan manasik di tingkat KUA tiga kali, dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang semakin dekat dengan waktu pemberangkatan.

Terdapat selisih jumlah jama'ah haji lunas tunda tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah jama'ah haji lunas tunda yang berhak mendapatkan nilai manfaat, sehingga membutuhkan penambahan penggunaan nilai manfaat sebesar Rp232.914.366.334,- yang sudah disampaikan sebelumnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati,
dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang perhitungan kuota tambahan haji reguler tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, dan usulan perubahan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada Pemerintah, semoga *Allah Subhaanahuata'aala* senantiasa..., senantiasa meridhoi amal dan pengabdian kita.

Aaamiin yaa robbal 'aalamiin.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Walaikum salam....

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

15.11

Baik, kita dengarkan dulu dari BPKH, khusus mengenai ketersediaan nilai manfaat yang akan diberikan ke jama'ah. Kalaupun pada rapat-rapat yang lalu, kita sudah memberikan keputusan, bahwa data yang salah lunas tunda 2022 ternyata adalah lunas tunda 2020, sekalipun sampai saat sekarang kita tidak pernah mendengar angkanya berapa?, pokoknya lunas tunda 2022, itu ternyata lunas tunda 2020, angkanya berapa tidak pernah. Yang ada kita ketahui duitnya. Jadi konsekuensinya saja, 232 miliar.

Oleh karena itu kalau di akumulasi..., di akumulasi dari kedua konsekuensi dari jama'ah yang harus kita berikan subsidi untuk jama'ah kita itu, kira-kira defisit berapa?.

Yang kedua, andaikan nanti kita akan mendapatkan kuota tambahan di tahun depan, kalau kita putuskan sekarang harus kita talangi dengan nilai manfaat diberikan subsidi, maka nanti ini menjadi pijakan keputusan tahun yang akan datang. Itu masih bisa tidak ditalangi?.

Kami persilakan, Kepala BPKH.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin.

Washsholaatu wassalaamu 'alaa rosuulillaah.

Laa hawla wala quwwata illaa billaah.

Yang terhormat, Bapak Pimpinan Rapat;
Wakil Ketua Komisi VIII;
Bapak-Ibu, dan;
Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati;
Bapak Dirjen dan jajaran beserta seluruh Anggota Badan Pelaksana BPKH dan;
Jajaran yang kami banggakan.

Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin *slide*-nya bisa ditampilkan.

Jadi mungkin kami izin untuk membagi dua bagian. Jadi nanti kami akan minta tolong anggota bidang keuangan, Pak Acep, untuk menjelaskan *financial highlight* yang terakhir sampai dengan April 2023. Termasuk didalamnya *update* mengenai transfer BPIH dengan posisi yang terakhir di tahun 2023 ini. Nanti kami akan menjelaskan mengenai proyeksi, surplus, defisit, *baseline* ya, dasar sebelum adanya yang akan diputuskan, dan kemudian usulan kira-kira ke depannya seperti apa yang ingin kami sampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Pak Acep untuk yang poin pertama dan poin kedua.

Silakan, Pak Acep.

**ANGGOTA PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
BIDANG KEUANGAN (ACEP RIANA JAYAPRAWIRA):**

Baik, terima kasih, Pak Kepala.

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

Saya lanjut saja.

Bapak-bapak dan Ibu Ketua dan seluruh Anggota Komisi VIII yang saya muliakan.

Jadi bagian pertama ini adalah mengenai *financial highlight* sisa dana kelolaan dan nilai manfaat sampai dengan bulan ini, maaf bulan lalu ya. Jadi kita lihat di sini sejak BPKH berdiri di tahun 2017 sampai dengan Desember tahun lalu, dana kelolaan itu secara historis adalah seperti itu, dari 102 triliun sampai di akhir April yang lalu mencapai 165.922 miliar, 'triliun', 165 triliun, maaf. Ini ada sedikit menurun karena memang dimulai ada transfer-transfer.

Kemudian selama, maaf balik lagi sebentar, jadi kita lihat, kita lihat di sini sampai dengan 2020 sebetulnya pertumbuhan itu cukup baik. Maaf, 2019 ya. Jadi itu *annual growth rate*-nya baik. Tapi kemudian mulai 2020, 2021, 2022 itu dia terus mengalami penurunan. Memang masih *growth*, tapi pertumbuhan dana kelolaan itu tidak secepat atau sebesar yang tahun-tahun sebelum *covid* gitu.

19.55

Disamping itu juga ada masalah mungkin kita ketahui bersama ada beberapa pembatalan yang meningkat *gitu*. Jadi orang membatalkan haji, terutama di reguler. Kalau di haji khusus nampaknya tidak terlalu apa?, besar perubahannya.

Namun *Alhamdulillah* di April ini pembatalan sudah mulai bisa kita atasi, jadi tidak terlalu besar lagi ya, *Insyallah* seperti itu. Mungkin sampai dengan akhir tahun ini memang diperkirakan sedikit saja. Tapi baru perkiraan ya, karena inikan baru bulan April, sehingga di Desember mungkin kurang 0,23% saja dari target, namun *Insyallah* ini akan tercapai, 165 triliun itu.

Next. Nah ini adalah nilai manfaat perkembangannya dari sejak berdiri sampai dengan akhir tahun lalu. Ya tertinggi di Desember 2021 itu, karena sebagaimana kita ketahui bersama, tidak jadi, ada dollar yang kita jual lagi, karena adanya tidak berangkat. Kita punya kelebihan dollar, kita kembalikan lagi ke rupiah, sehingga ada setengah triliun sendiri di situ pendapatan nilai manfaat. Sebagai langkah kita mengamankan posisi US Dollar, kita jual lagi jadi rupiah.

Desember 2022 itu sempat 1,1 sampai dengan April ini, kita mencapai 3,672 triliun, dan *Insha Allah* di akhir tahun itu sesuai anggaran akan mencapai 10,012 triliun. Nah ini kalau kita lihat 36,6% dari target kalau kita 4 bulan itu kita anggap sepertiga dari 12 bulan, maka 36,6% itu lebih tinggi dari pada 33,3%, artinya sampai sejauh ini BPKH melampaui targetnya.

22.04

Next. Yang berikutnya adalah *update* nilai *transfer* BPIH tahun ini, jadi. *Next*, ini adalah *table update transfer* BPIH tahun 1444 Hijriah, tahun 2023 Masehi. Nah kita lihat di sini di kolom pertama itu, ini sesuai suratnya *ya*, jadi itu ada kolom tanggal transfer, uraian. Yang biru adalah nominal permintaan dari Pak Dirjen. Kemudian yang merah atau *orange* adalah pemenuhannya. Dan yang tabel paling kanan adalah persentase pemenuhannya.

Kita di sini permintaan itu ada yang dalam US Dollar, ada yang SAR, ada yang rupiah, *gitu*. Nah kalau kita lihat sampai dengan 17 Mei, itu kita sudah memenuhi permintaan dari PHU, yang baik dalam US Dollar maupun rupiah.

Nah kemudian SAR juga demikian. Kenapa kami pisahkan di dua bawah, karena tahapannya agak sering. Jadi dari pada tanggalnya terlalu banyak ditampilkan, langsung saja kita tulis bertahap seperti itu. Tapi SAR ini sudah sepenuhnya dikirim ke rekening PHU. Yang belum adalah yang 30 sama 31 *ya*, sama tanggal 5 Juni.

Namun demikian kalau tidak salah Pak Dirjen juga meminta percepatan, dan ini sudah, *Insha Allah* dalam proses, atau mungkin sudah terpenuhi sekarang. Jadi kalau kita lihat dari total 18,579 permintaan triliun tadi, permintaan PHU, maka sudah kita penuhi sebesar 89%. Kalau soal di rupiahkan itu soal *currency* saja begitu *ya*.

Permintaan 18, *print* 19 hanya karena ini didahulukan dalam rupiah sehingga Nampak lebih besar. Diperkirakan sampai dengan akhir bulan ini akan keluar dari sistem keuangan BPKH 18,48 triliun, atau 99,51%, atau mungkin selisih sedikit hanya 0,4% dari yang total di minta. Sederhananya mungkin sampai dengan saat ini yang diminta oleh Kementerian Agama sudah sepenuhnya diberikan oleh BPKH.

Selanjutnya terima kasih, saya serahkan kembali kepada Pak Kepala.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

24.37

Terima kasih, Pak Acep.

Lanjut, lanjut, berikut ini adalah proyeksi dari dana PIH. Jadi kalau kita lihat di kolom pertama tahun 2022, itu adalah *baseline*-nya sampai dengan akhir penutupan 2022, yang selama ini kita sudah bahas.

Kemudian untuk yang kolom berikutnya permintaan dana yang pertama. Ini adalah posisi sebelum adanya keputusan untuk penambahan nilai manfaat dalam rangka meng-*cover* BIPIH bagi jama'ah lunas 2020 yang nilainya 845 miliar.

Sehingga kalau kita berdasarkan kesimpulan di rapat tanggal 15 Februari 2023, maka ada tambahan 845 miliar, total yang menjadi di *cover* dari nilai manfaat. Kalau kita lihat di ujung kolom sebelah kanan maka ada penurunan cadangan nilai manfaat yang tadinya 14,5 triliun rupiah, menjadi 13,678 triliun rupiah. Nah nanti ini adalah posisi yang kami sampaikan sebagai *baseline*. Bahwa kemudian nanti akan diputuskan, berapapun yang harus di *cover* dari nilai manfaat nanti kami akan mensimulasikan kembali setelah adanya arahan dari Bapak Pimpinan.

Lanjut. Berikut adalah komposisi yang kami proyeksikan dengan asumsi, bahwa pertama besaran BIPIH itu, eh BPIH itu dan komponennya itu akan tetap sampai dengan 2027. Ini karena untuk kami ingin memperlihatkan bahwa *baseline*-nya adalah saat ini seperti ini. Nanti bahwa kemudian ada penambahan yang lain, nanti kita akan tampilkan kembali, simulasinya.

Jadi kalau kita lihat berdasarkan kesejahteraan RDP tanggal 15 Februari 2023, di mana rasio BIPIH dan beban nilai manfaat terhadap total BPIH per jama'ah rata-rata masing-masing adalah 55 dan 45%. Namun karena kemarin kita ada total permintaan dana, serta tambahan beban nilai manfaat untuk jama'ah lunas tunda yang tadi nilainya 845 miliar, sehingga sluruh, secara keseluruhan rasio BIPIH dan nilai manfaatnya berubah, dari 55-45 menjadi 51,9 dan 48,10%. Walaupun ini memang masih lebih besar BIPIH ketimbang nilai manfaat yang di *cover* untuk BPIH tersebut.

Berdasarkan asumsi yang di atas tadi, maka kalau kita lihat, kita proyeksikan akumulasi nilai manfaatnya ke depan, dengan asumsi di akhir posisi 2022 adalah 15,27 triliun, kemudian dengan tambahan beban nilai manfaat jama'ah lunas tunda yang 845 miliar rupiah, posisi di 2023 menjadi 13,68 triliun rupiah. Dengan asumsi yang tadi kami sampaikan, besaran BPIH nya tetap dengan kuota yang sama, maka dengan rasio yang antara nilai manfaat dan BIPIH juga sama, yaitu besaran 51,9 dan 48,10, akan ada, cadangan dari nilai manfaat ini akan habis di 2027, tersisa minus 530 miliar rupiah. Nah ini yang mungkin yang ingin kami sampaikan dan dapat menjadi pertimbangan ke depannya untuk memutuskan apa yang harus di *cover* dari nilai manfaat pada rapat ini.

28.56

Lanjut, *next*, sehingga mengingat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (1) bahwa besaran pengeluaran untuk penyelenggaraan

ibadah haji sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. Dan mengingat PP Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 21 ayat (4) bahwa besaran pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon maaf ada sedikit *typo* di bawah tadi.

Menimbang adanya kenaikan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat yaitu sebagai berikut:

Pertama, tambahan biaya BPIH yang bersumber dari nilai manfaat untuk menutup BIPIH jama'ah lunas tunda 2022, sehingga jam'ah tidak perlu melakukan setoran lunas, dan juga tambahan biaya BPIH yang bersumber dari nilai manfaat akibat adanya tambahan kuota haji, maka beberapa hal yang menurut kami, perlu keputusan dari DPR dan Pemerintah adalah, satu, dalam rangka menjaga *sustainability* keuangan haji dengan prinsip keadilan, maka kenaikan kuota haji Indonesia dapat dilaksanakan sebagaimana kesimpulan RDP tanggal 15 Februari 2023, nomor 9 huruf I, yang menyatakan bahwa "merekomendasikan kebijakan agar jika terdapat tambahan kuota dapat dialokasikan untuk jama'ah reguler dengan pembebanan biaya BPIH penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Nah ini satu hal yang perlu diperhatikan pada hasil dari kesimpulan RDP 15 Februari 2023.

Lalu yang kedua, penggunaan nilai manfaat untuk jama'ah lunas tunda tahun 2022, sebesar 232 miliar rupiah, sehingga jama'ah tidak perlu melakukan setoran lunas.

Lalu penggunaan nilai manfaat untuk tambahan kuota sebanyak 8.000 jama'ah kami mengasumsikan sampai dengan tadi malam adalah seluruhnya merupakan jama'ah reguler. Lalu kenaikan biaya bagi TPHD dan KBIHU agar tidak dibebankan ke nilai manfaat. Lalu semua tambahan BPIH tahun 2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat, baik untuk jama'ah lunas tunda 2022 dan tambahan kuota jama'ah, mohon agar dapat dicantumkan nominalnya dalam Keputusan Presiden yang baru sebagai basis bagi kami untuk melakukan transfer sesuai dengan permintaan.

Kami rasa untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Mohon arahnya dan masukannya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Baik, terima kasih, Pak Dirjen, Pak Kepala BPKH.

32.36

Jadi ada dua hal, pertama penyampaian dari BPKH, perlu mencermati besaran yang akan kita pakai. Karena ada dua hal, kelihatannya belum tuntas ini dari BPKH karena ingin dicantumkan nominal yang dipakai dari catatan lunas tunda 2022, yang ternyata lunas tunda 2020, berakibat dengan kebijakan yang tidak memberikan beban untuk tambahan pelunasan.

Yang kedua, mengenai tambahan kuota, sehingga kalau melihat ini baru melihat di 2023. Kalau tiba-tiba lagi ada tambahan kuota di 2024, maka proyeksi 2027 itu bisa mempercepat menjadi 2025. Karena kita belum tahu juga, karena kita selalu merekomendasikan supaya ada tambahan kuota. Belum lagi kalau tambahan, belum lagi kuota regulernya bukan 221.000, bagaimana kalau 230.000? kuota reguler, nah langsung harus kita berikan nilai manfaat. Setelah kuota reguler 223.000, tambah lagi tambahan kuota 230.000.

34.20

Itu, para Anggota, kira-kira kondisi keuangan haji kita. Kalau sekarang ini sudah minus tahun berjalan ya, minus tahun berjalan. Dan yang kedua pemaparan dari Pak Dirjen, Pemerintah, yaitu Kementerian Agama, sudah memproyeksikan 8.000 jama'ah ini akan dialokasikan untuk jama'ah reguler yang sudah dicadangkan. Tentu sebutan reguler yang dicadangkan ini apakah masuk di dalam pasal undang-undang yang kita sebutkan itu?, karena di pasal lain di Undang-Undang Haji disebutkan juga bila ada kuota tambahan akan di atur oleh menteri.

Kemudian, nanti para Anggota akan me, me, mendalami, Pak Dirjen. Berarti apa yang disampaikan oleh Menteri di Raker 2 hari yang lalu-3 hari yang lalu berarti ada kesalahan informasi. Karena pada saat itu bolak-balik Menteri menyampaikan bahwa semuanya sudah melunasi. Semuanya sudah melunasi, bolak-balik di tanya para Anggota, semuanya sudah lunas, hari ini sudah lunas ya. Tapi Dirjen sendiri sekarang menjelaskan bahwa ada beberapa daerah ini yang tidak lunas, dan bahkan dialokasikan ke tempat lain. Maka informasi yang disampaikan pada Raker dengan Menteri itu berarti tidak benar, tidak *valid*.

Mungkin saja yang dilaporkan itu adalah yang dijadikan cadangan. Kalau cadangan ya tentu semua orang ingin berangkat. Saya juga mau ingin Pak berangkat di situ, nah kira-kira begitu, kalau dijadikan cadangan. Artinya itu bukan reguler yang daftar tunggu di jama'ah 221.000 itu, berarti itu ada salah informasi. Semua teman-teman menganggap yang bolak-balik ditanya itu bahwa reguler 221.000 sudah mendaftar. Bahkan kita heran juga Menteri menyampaikan sudah melebihi. Kalau melebihi kan berarti untuk cadangan. Yang kita tanya itu adalah reguler yang proporsinya berangkat di tahun ini, yang kita minta mereka melunasi. Ternyata sampai sekarang kita juga belum tahu ini seperti apa, nanti didalami oleh para Anggota.

Di sini disebutkan ada dari 24.276 jama'ah tersebut terdapat sisa kuota. Ini apakah sudah masuk cadangan di sini?. Kan ini sudah di tutup ini, pelunasan sudah di tutup, sementara yang lain masih ada 29, 24.276 jama'ah, sehingga kuota tersisa sekarang itu ada sebanyak 266, yang dibagi-

bagi ke provinsi lain. Apakah yang sudah masuk haji tahun ini sudah masuk sebagian dari cadangan atau bagaimana?, Ini belum dijelaskan ke kita.

Karena itu pemaparan dari Dirjen sudah disampaikan, dari Kepala BPKH sudah sampaikan, kami persilakan kepada para Anggota untuk menyampaikan tanggapan. Dan ini bolak-balik, tunjuk-tunjuk sudah ini, jadi kita persilakan saja. Tidak berdasarkan yang terbesar dan yang terkecil, pokoknya yang tunjuk saja.

Silakan, Pak John.
Kiri-kanan saja ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati;
Pak Dirjen PHU beserta seluruh jajaran yang saya hormati;
Pak Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji beserta seluruh jajaran Komisioner yang saya hormati.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Tadi telah disinggung oleh Pak, oleh Pimpinan tentang terpakainya kuota haji. Pak Dirjen, terus terang saja kami memang bingung, Pak Dirjen, bagaimana sebenarnya informasi yang *valid* terhadap pemakaian kuota haji ini?.

Tiga hari yang lalu masih *terngiang-ngiang* di telinga kita, bahwasannya kuota haji itu sudah terpakai 100%, bahkan sudah lebih. Itu informasi yang kami dapat. Dan hari ini Pak Dirjen mengatakan, bahwa masih ada yang belum bayar, sehingga kuota haji yang tidak terpakai ini akan di transfer ke provinsi yang membutuhkan. Kurang lebih itu yang saya cerna.

Di sisi lain, Pak Dirjen, sejak kami menerima informasi dari Pak Menteri, ketika kita rapat di sini, 3 hari yang lalu itu, bahwa kami juga menerima laporan dari provinsi-provinsi bahwa ternyata masih banyak juga yang belum melunasi. Ini bagaimana sebenarnya informasinya?.

Di sisi lain Pak Menteri mengatakan, bahwa kuota haji itu sudah terpakai, bahkan sudah plus berapa ratus orang pada waktu itu, di sisi lain kami mendapat informasi dari provinsi, masih banyak yang belum melunasi, dan hari ini ternyata benar, Pak Dirjen sendiri menyampaikan bahwa memang ada yang belum melunasi, sehingga sudah di *close*, dan belum yang mana kuota yang tidak terpakai dikasihkan kepada pemerintah provinsi lain yang membutuhkan.

Tolonglah kami diberikan informasi, artinya informasi yang betul-betul *valid*. *Toh* kita-kita semua di sini, tidak usah kita di ayun juga begitu kan. Sebab keakuratan itu, bagi kami sangat penting. Tidak usah malu-malu juga kalau seumpamanya memang tidak terpakai, *ya* kita serahkan kepada penyelenggara ibadah haji khusus untuk menyelesaikan. Kalau memang lebih dari 8%, sesuai dengan aturannya, *ya* kita carikan landasan hukumnya, *legal standing*-nya. Tapi kalau seumpamanya Pak Dirjen tiba-tiba mengatakan bahwa tidak terpakai ini, kita juga sudah sulit untuk membuat atau merancang suatu landasan hukum bagaimana kita menyerahkannya kepada pihak lain untuk supaya kuota ini tidak terpakai, supaya kuota ini terpakai.

Pak Dirjen, kita perlu untuk memberangkat orang, Pak Dirjen. Sangat banyak *ya*, calon-calon jama'ah haji kita yang betul-betul merindukan untuk berangkat. Saya pikir kita satu pemikiran samalah. Tetapi kami perlu, perlu informasi yang akurat itu. Kita jangan diberikan informasi-informasi yang kemudian atas faktanya terbantahkan informasi itu. Provinsi-provinsi lain tidak Pak, kami masih sekian banyak yang belum melunasi, belum Pak, di sini sekian banyak yang belum melunasi. Nah bagaimana ini sebenarnya.

Yang kedua, sekali lagi kami minta kepada Bapak, kita harus memaksimalkan kuota yang ada. Jangan sampai kuota kita ini satu kursi pun tidak terpakai, satu kursi pun jangan sampai tidak terpakai. Kita *alhamdulillah* kita dapat tambahan 8.000 kursi, dan hari ini kita rapatkan dengan BPKH tentang penambahan biaya yang mungkin dipergunakan untuk tambahan kuota ini.

Selanjutnya kepada BPKH, saya mau menanyakan, atas permintaan, tadi saya sudah mendengar paparan dari Pak Acep, bagaimana kondisi keuangan BPKH pada hari ini, tapi secara, secara *gamblang*, secara prinsip, kami menanyakan kesanggupan BPKH, apakah BPKH sanggup? artinya memenuhi permintaan Pemerintah atas tambahan kuota yang sebanyak 8.000 orang?. Tentu proporsional, *ya*. Yang reguler tentu dikurangi dulu 8% dari 8.000, begitu kan *ya*.

Yang kedua, saya masih ingat saya, Pak Acep, ketika kita rapat tempo hari Bapak minta izin kepada Komisi VIII ini untuk membeli dollar 15.250. Sekarang bapak saya dengar paparan Pak Acep, Pak Acep jual dollar justru. *Oh* tahun lalu, bukan yang sekarang, *oh sorry*. Saya pikir Bapak menjualnya untuk sekarang, *iya* makanya pada rapat kita tempo hari itu saya masih ingat, saya mencatat itu, bahwa Bapak memerlukan dana, memerlukan dollar, Bapak minta izin ke kita 15.250. Dan *alhamdulillah* berkat do'a kita bersama dollar sekarang masih berkisar antara 14.875 sampai 14.900.

Yang ketiga, *iya* hari ini pada dasarnya, Pak Fadlul, kita adalah berbicara tentang masalah permintaannya Dirjen PHU, tentang adanya penambahan kuota. Hal-hal lain yang berkaitan dengan, dengan apa yang disampaikan tadi mungkin dalam satu *session* tersendiri kita diskusikan. *Toh* di dalam renstra kita juga sudah diskusikan tentang rencana-rencana daripada BPKH, dalam apanya.

Tetapi satu yang menarik dalam konteks ini, betul apa yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat, oleh Pak Marwan tadi, harus diantisipasi oleh BPKH kedepannya tentang penambahan kuota, pak. Karena Arab Saudi sudah bersiap-siap tentang itu. Tidak selamanya kuota kita 221.000. Saya yakin, *haqqul yaqin* saya, di tahun 2024-2025, menambah, bertambah. Karena apa?, fasilitas dari pada Pemerintah Arab Saudi tentang haji ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi kepesimisan daripada pengelola keuangan haji tentang gitu ya, tentang, tentang apa namanya, biaya haji ini, biaya haji yang dipikul oleh BPKH, mari kita Pak kita sama-sama semangat. Penambahan kuota itu pasti ada, yakin saya. Sekarang 221, mungkin saja di tahun 2024, 230.000, Pak Marwan tadi sampaikan. Atau mungkin juga lebih dari 250.000. Untuk itu kita minta kepada BPKH betul-betul mengelola keuangan haji itu dengan sebaik-baiknya sehingga harapan masyarakat tentang berangkat haji akan bisa direalisasikan dengan sebaik mungkin.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih banyak, Pak John, dari Fraksi Golkar.

Tapi mungkin yang terpenting begini, kuota 8.000 ini, apakah memang dalam *e-hajj* itu semua untuk reguler? Itu kan yang penting juga itu. Kalau semua reguler, berarti normatifnya ya harus haji reguler. Cuma kan persoalannya ketika yang 8.000 ini tidak mampu terserap dengan waktu yang sangat singkat, apakah kita akan biarkan begitu saja?. Atau ada opsi-opsi lain? yang mungkin memiliki payung hukum. Karena kita juga mau mengambil keputusan *kan* kita tidak mau juga terlibat dalam hal-hal yang melanggar aturan. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan.

Kemudian yang kedua Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Yang saya hormati, Pimpinan Komisi VIII dan seluruh jajarannya teman-teman Komisi VIII;

Yang saya hormati, Dirjen PHU Kementerian Agama dan seluruh jajarannya;

Kepala BPKH dan seluruh jajarannya.

Pertama, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dirjen PHU. *Alhamdulillah* Pak, Sumatera Utara dari direncanakan 5

kilometer mendapat daerah 1,8 kilometer, di daerah Jarwal Pak. “Wah” Pak Ketua langsung. Itulah hebatnya orang Medan, Pak Ketua.

Kemudian, Pak Dirjen, ya, kemarin saya melakukan 4 kali manasik di dapil saya, apa yang Pak Dirjen sampaikan di Sumatera Utara ada 130 jama'ah harus bergeser karena tidak melunasi. Waktu saya melakukan manasik, Pak Dirjen, itu saat itu ada posisi 245 jama'ah yang belum melunasi. Ya orang bilang itu *injury time*. Dalam melaksanakan manasik, saya katakan bahwa tahun 2023, Kementerian Agama mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun haji ramah lansia. Jadi lumayan juga itu, Pak Dirjen, dari angka 245 balik ke 130, mustinya lebih besar lagi.

Banyak hal-hal yang kami sampaikan, bahwa, karena kebanyakan mereka bukan tidak mampu melunasi, akibatnya terpisahnya suami dan istri. Yang kedua yang paling banyak terjadi adalah lansia tidak mempunyai pendamping daripada keluarga yang berangkat. *Alhamdulillah* kita dalam melakukan manasik, pertama kita katakan naik Garuda isinya 360, mestinya 390, lebih lapang. Kemudian juga kita katakan Jarwal itu cuma 1,8 kilometer. Itu salah satu poin yang membuat, yang ragu-ragu berangkat menjadi berangkat.

Di sini satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak Dirjen, bahwa di halaman ketiga, dikatakan bahwa 7.360 orang reguler, dan 640 yang haji plus. Biasanya, Pak Dirjen, kalau hal yang menambahkan begini kan kita tidak perlu lagi membahas, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk 640 jama'ah haji khusus?. Tapi saya lihat, mohon maaf Pak Dirjen, mungkin lupa, ya namanya juga manusia biasa. Kemudian juga ya kalau boleh itu nanti tolong dihitung-hitung. Ini bahagian keuangan juga ada di sini, iya kan. Karena pada prinsipnya kita Komisi VIII menyetujui anggaran-anggaran tambahan yang diusulkan oleh Kementerian Agama lewat Pak Dirjen.

Ada sedikit, Pak Dirjen, yang mengganjal di hati saya. Di Sumatera Utara, Pak Dirjen, dikatakan kepada jama'ah, bahwa makan bukan dua kali, dikatakan tiga kali. Saya ingin mendapatkan nantinya penjelasan bahwa apa benar bahwa ini dapat sarapan pagi. Karena ada bahasa, ini mohon maaf Pak Dirjen, ada bahasa yang kami dengar dari kanwil, bahwa aka nada pengurangan. Mungkin nasinya yang mestinya 250 gram mungkin jadi 200 dan lain sebagainya. Ini, ini kalau kami salah apa, kalau apa yang kami sampaikan waktu saat kami manasik, ternyata salah, *Insyallah* yang dikejar-kejar kami juga nanti Komisi VIII. Ini mohon nanti bisa Pak Dirjen bantu dalam menjelaskannya.

Kemudian ini untuk BPKH ya. Untuk BPKH, saya malu juga ini melihat di halaman 4, prediksi daripada *finance highlight* dana kelola dan nilai manfaat adalah 10 poin 012, itu masih di bawah 2022, yaitu 10 poin 113. Itu berarti terjadi penurunan ya. Sedangkan ini dikatakan masih proyeksi ya. Biasanya yang namanya proyeksi itu, itu sesuatu yang lebih, yang lebih daripada nilai yang dianggarkan.

Kemudian juga waktu kita pernah rapat dengan BPKH, BPKH menyatakan ya, bahwa Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2030 akan dapat menampung jama'ah sebesar 5 juta. Itu artinya, tadi mungkin Pak John mengatakan dari 220 bisa 240, itu artinya 2030, kalau kita asumsikan dengan jumlah penduduk Republik Indonesia saat ini ya, yang dengan kuota 230 ribu berarti dikali 2 lebih kurang 460.000 jama'ah *Insy Allah* yang bisa diberangkatkan dari Republik Indonesia. Sedangkan tadi Bapak Kepala BPKH menyatakan mungkin tahun 2027 uang kita pun sudah minus dan lain sebagainya. Ini, ini bahasa-bahasa yang sangat membahayakan sekali. Itu tentunya Bapak Kepala harus melakukan persiapan-persiapan awal, apabila terjadi ledakan jama'ah haji di tahun 2030 sebesar 460.000 jama'ah yang berangkat dari Indonesia.

56.00

Kemudian, ini di halaman 11 ya, penggunaan nilai manfaat untuk tambahan kuota sebanyak 8.000 jama'ah. Langsung Pak *anu*, saya tidak tahu ya, dengan asumsikan, ini jama'ah reguler, sedangkan aturan dan perundang-undangan ada 8% untuk jama'ah khusus. Jadi mohon ke depan, memang sepertinya itu hal kecil ya, tapi jangan sampai terjadi kesalahan dan lain sebagainya.

Kemudian juga di halaman 8, terjadi penurunan sebesar minus 845 miliar, ya. Itu tentunya sebuah defisit, saya pikir BPKH dengan apa, orang-orang baru, tenaga-tenaga baru, harus lebih bersemangat, mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir. Kami sangat berharap BPKH ke depan tentunya dengan orang-orang yang professional, akan bisa menghasilkan pendapatan yang kedepannya jauh lebih baik lagi.

Saya rasa itu saja, Pimpinan, saran dan masukan dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan.

Wabillaahitaufiq wal hidayaah.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Selamat ke Pak Husni dari 5 kilo menjadi 1 kilo setengah ya.
Selanjutnya saya persilakan Fraksi PKB, Pak.

F-NASDEM (DRA. DELMERIA):

Nasdem.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Oh, maaf, Nasdem.
Lansia Bu.
Silakan Bu.

F-NASDEM (DRA. DELMERIA):

Terima kasih, Ketua.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Yang kami hormati, Ketua Komisi VIII beserta seluruh Anggota Komisi VIII yang berbahagia;

Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya;

Ketua BPKH beserta seluruh komisionernya yang ikut.

Bapak-Ibu yang kami banggakan;

Hadirin-hadirat yang berbahagia.

Orang Medan tentu bersemangat.

Horas di hita saluhutna.

Seperti apa temuan Pak Husni, kami di lapangan juga ada temuan kita manasik di lapangan, jama'ah *ngotot* Pak. Apa yang disampaikan kanwil berbeda dengan apa yang dapat kami di lapangan. Di Tanah Datar jama'ah *ngotot* ke kami, kami sampaikan, makan di Mekkah itu 3 kali, di Madinah 3 kali, jama'ah *ngotot* bahwa kanwil mereka menyampaikan waktu manasik tiga kali. Halo kanwil, halo Kementerian Agama, kanwil agama mengatakan tiga kali di Makkah. Cuma di Madinah yang dua kali katanya.

Di Tanah Datar jama'ah *ngotot* waktu kami manasik di Tanah Datar. Ibu salah, dia bilang begitu. Jadi seolah-olah kami tidak tahu di panja, berbeda antara keputusan di DPR dengan keputusan di kanwil. Jama'ah *ngotot*, kami disampaikan di sini sama orang Kementerian Agama, di kanwil Kementerian Agama, 3 kali di Makkah, di Madinah yang 2 kali Bu. Jadi kita tidak bawa keputusan panja sama Kementerian Agama, jadi susah begitu, kita jawab apa lagi. Besok-besok kalau turun ke lapangan membawa keputusan Kementerian Agama yang ditanda tangan sama Komisi VIII kita, Ketua.

Terus masalah *living cost* juga besok kalau kita memutuskan *living cost* 750 ribu, eh 750 riyal juga kita bawa keputusan itu. Karena orang biasa menerima 1.500 sekarang 750, juga kita bisa-bisa dipermalukan masyarakat juga. Karena masyarakat sekarang asal *dower* saja mulutnya kadang-kadang, *gitu*. 750 sekarang *living cost* katanya, apa itu uang 750, katanya. Kadang-kadang kalau kita banding-bandingkan naik haji sekarang itu lebih murah kalau kita bilang begitu. Tapi masyarakat sekarang kan sebentar-sebentar sedikit viral takutnya kalau kita banding. Tapi kalau yang tahu itu kita bilang naik haji sekarang lebih murah kalau kita bilang. Saya naik haji tahun 2000, harga emas 170, saya bayar 17 juta, berarti saya bayar 100 emas, 100 emas sekarang 250 juta Bu, kalau yang tahu bisa, berarti naik haji saya duluan naik haji plus, sekarang naik reguler cuma 40 juta, 50 juta paling ibu bayar kita bilang begitu. Kalau dibandingkan emas sekarang cuma 20 emas kita bilang begitu. Dia tidak bisa bilang, kalau kita dulu aku naik haji tahun 2000, 250 juta kalau dibilang sekarang, sudah haji plus saya perginya, kan begitu. Kalau yang bisa kita terangkan pelan-pelan, sekarang umroh saja kalau langsung

pesawatnya bu, 35 juta, baru 10 hari-11 hari pulang pergi. Kalau yang *ngerti*, kalau yang *nggak ngerti* kan susah dibilanginnya.

Jadi besok-besok kami kalau manasik Kementerian Agama, bawa hasil keputusan kita bersama itu hasil panja itu kita bawa, ini panja bersama, ibu baca. Kita fotokopi kalau perlu. Kadang-kadang kita DPR dipermalukan juga, jadi tidak senada antara Kementerian Agama dengan, dengan kanwil dengan kami, DPR kadang-kadang di bawah begitu. Malu kita Pak, tidak senada kanwil dengan Kementerian Agama, *ngotot* orang itu. Kanwil bilang 3 kali di Makkah, di Madinah 2 kali, dia bilang begitu. Kita panggil kanwilnya susah juga, dan mana buktinya kanwil begitu. Jadi kanwil juga hati-hati. Kalau pun ada sarapan, mau tidak ada sarapan, jangan bilang kalau tidak jelas. Kadang-kadang malu juga kita.

Terus satu lagi, yang terakhir mungkin. Kalau ada sisa-sisa yang tidak jelas, yang belum jelas, Pak Dirjen, bagi ada masukan bagi kami setiap Anggota ini setiap turun sekarang ada itu titipan-titipan kalau ada umpamanya yang tidak kosong, sekarang waktu sudah dekat, ini kayak Delmeria dari Sumatera Barat ada titipan 20 orang, sudah bayar lunas, sudah ada bukti. Kalau ada yang belum yang dari pada tunggu-tunggu, daripada ini sudah dekat waktu *ya* sudah masukan saja yang 20 ini. Cara bagaimana Siskohaj memajukannya masukkan saja, dari pada ditunggu-tunggu juga sistem siskohaj ini naik kan, susah juga.

Jangan-jangan gara-gara *error* nanti lagi BSI, tiap sebentar BSI *error*-BSI *error*. Yang sudah lunas, yang sudah ada bukti lunasnya, sudah majukan saja yang ini, tidak usah menurut siskohaj lagi. Daripada tiga hari lagi, tidak jelas begitu. Bisa tidak Pak?, kebijakan itu diberlakukan?, yang sudah lunas, sudah ada bukti lunas. Jadi tidak usah nunggu nomor antri lagi, mungkin saja tidak diberlakukan sistem siskohaj yang tinggal sisa ini lagi, yang 2.000?, yang berapa ribu?. Seperti apa yang dibilang sama Pak John tadi, mana buktinya Kementerian Agama, sudah beres, mana yang sudah cukup.

Nanti jangan-jangan setelah dihitung kurang lagi berangkat haji. Setelah selesai semuanya, setelah ditutup semuanya, tahu-tahu masih sisa kuota, masih sisa kuota, sementara yang berminat naik haji itu banyak, gitu. Jadi perhitungan kita tak jelas juga. Kayak seperti kemarin itu, tak jelas perhitungannya. Tahu-tahunya ada saja selisih lagi, gitu, selisih hitungan, baik siskohaj maupun selisih bayar. Dihitung lagi-hitung lagi, gitu. Mohon untuk koreksi selanjutnya benar-benar teliti, gitu. Dan ini waktu sudah dekat. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi ada hal-hal yang dipermalukan kita sama masyarakat. Setelah kita berhitung, sudah berakhir, sudah ditutup, sudah ditutup pembayaran haji kita, sudah ditutup, haji kita sudah berangkat semuanya, sudah rapih semuanya, tahu-tahu masih ada sisa haji kita 500 lagi. Terus masyarakat *ngoceh* lagi, "DPR *nggak* benar", kita dimalukan di masyarakat, bagaimana DPR berhitung ini?, katanya. Jadi *dioceh-oceh* kita di masyarakat, malu kita kadang-kadang turun ke masyarakat, Bapak.

Sekian, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih Bu, nanti dijawab tuntas oleh Pak Dirjen, sebentar.
Selanjutnya kita persilakan Fraksi PKB.
Silakan Pak Kiai, eh Ibu Anisah, silakan.

F-PKB (DRA. HJ. ANISAH SYAKUR):

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati;
Pak Dirjen yang saya hormati beserta;
BPKH yang hadir yang saya hormati.

01.05.20

Pertama, tentu kita semua sepakat, bahwa bagaimana pesawat atau *seat* daripada haji ini tidak ada yang kosong. Itu mungkin pertama yang harus kita utamakan. Jadi jangan sampai ada yang kosong satupun dari *seat* itu, agar mereka-mereka yang tidak berangkat itu bisa berangkat. Tinggal sekarang bagaimana kita untuk bisa memastikan, bahwa itu betul-betul terisi. Sementara memang ada di beberapa daerah itu kuotanya belum terisi, jadi belum terpenuhi, dari kuota yang ditetapkan itu belum terpenuhi.

Bahkan ada yang mengusulkan, karena di dalam aturannya itu, kan kalau kuota itu tidak terpenuhi dan kemudian sudah diperpanjang 1 bulan masih juga tidak terpenuhi, itukan pengisian kuota itu bisa diberikan kepada jama'ah haji yang terpisah dengan *mahrom*, jama'ah haji penyandang disabilitas atau pendampingnya, jama'ah haji lunas tunda, pendamping jama'ah haji lanjut usia, dan jama'ah haji pada urutan berikutnya. Nah ini ada usulan, kami menyampaikan usulan dari bawah dari mereka-mereka yang mengelola haji, bagaimana kalau yang tidak terpenuhi itu diberikan kepada para pendamping-pendamping?, karena pendamping ini sudah benar-benar siap uangnya, mereka ini sudah benar-benar siap akan berangkat, gitu. Jadi tidak lagi menunggu kesiapan dari pada yang lain. Ini yang pertama.

Yang kedua, tadi disampaikan bahwa yang 8.000 itu, 5.765 ini diberikan jama'ah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan namun belum memperoleh kuota, tadi sebanyak 5 ribu sekian. Saya ingin tahu, apakah yang disampaikan ini sudah melalui proses penelitian atau laporan-laporan dari seluruh Indonesia ada jama'ah haji yang sudah lunas tapi belum memperoleh kuota?, ini apakah sudah ada data itu? Saya khawatir ini hanya sekedar apa itu rencana, tapi datanya belum ada, sehingga kita khawatir nanti ketika disebar ada yang tidak bisa terakomodasi, diambil, akhirnya kan juga *muspro* juga begitu. Jadi bagaimana ini dipastikan bahwa mereka itu betul-betul mengambil. Dan bagaimana cara pembagiannya? Apakah dibagi seluruh tiap-tiap provinsi atau bagaimana, ini kami ingin tahu, bagaimana pembagian yang 5.765.

Nah selanjutnya juga ada informasi bahwa akan ada tambahan pendamping, ini benar atau tidak? Karena di bawah itu banyak yang usul, “ini, Ibu Anis, mau ada tambahan pendamping, tolong kami kemarin tidak masuk, barangkali bisa dimasukkan pendamping tambahan ini”. Nah ini saya ingin tahu kepastiannya apakah memang betul ada tambahan pendamping, petugas maksud kami, petugas yang untuk mendamping. Pokoknya petugas itu ada tambahan kuota, ini apa benar apa tidak.

Selanjutnya yang terakhir mungkin, kita ingin bagaimana, masalah haji inikan selalu sifatnya sangat mendadak, begitu ya, bagaimana untuk biar jauh-jauh itu diupayakan untuk segera diumumkan, agar supaya mereka itu bisa memastikan. Karena orang haji itu walaupun, walau diumumkan sekarang pelunasan, setengah bulan belum tentu mereka punya uang. Kadang-kadang masih banyak yang, ya mohon maaf, kemarin saja ada yang datang ke rumah saya, mau pinjam untuk melunasi katanya, untuk pelunasan. Inikan berarti mereka itu banyak yang juga belum siap karena terlalu mendadaknya pengumuman yang diberikan.

Kalau memang setiap tahun itu ada tambahan, kalau bisa ya dilakukan koordinasilah dengan Arab Saudi bagaimana kira-kira kita itu tiap tahun dikasih tambahan berapa. Kalau bisa itu bisa dipastikan begitu, jadi jauh-jauh mereka itu sudah diberitahu agar bisa mempersiapkan diri untuk bisa melunasi. Karena pada dasarnya ada beberapa orang yang memang dia itu siap, tapi kuotanya itu masih lama. Karena itu tadi yang diusulkan oleh Ibu Delmeria dari Nasdem itu, saya juga setuju, kalau memang nanti sampai pada waktu yang sangat *mepet*, kemudian belum ada yang melunasi ya diberikan saja, diumumkan saja, siapa yang mau berangkat bisa melunasi, begitu saja.

Saya kira itu masih banyak, karena masih ada orang yang “saya mau berangkat, saya juga mau menambah, walaupun tambah saya mau”, nah itu bisa. Mungkin itu bisa dikordinasikan dengan Komisi VIII atau bagaimana sehingga kita bisa menjaring. Di daerah-daerah kita itu banyak mereka yang ingin berangkat, ingin melunasi. Sampai-sampai mengatakan “walaupun harus tambah sekian kami juga mau”, misalnya seperti itu. Ini yang kami usulkan, supaya mereka tidak terlalu mendadak.

Jadi sekali lagi terutama yang saya ingin tahu itu 5.765 ini apa pasti sudah ada yang mengisi? atau bagaimana?, bagaimana sistemnya untuk bisa supaya terisi semuanya itu untuk membagi ke kabupaten-kota, agar tidak tersentral di satu kabupaten-kota tetapi bisa merata. Ini yang kami maksudkan.

Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan.
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Ada yang mau menambah, Pak Luqman, *monggo*.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan. Silakan.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

01.11.46

Terima kasih.

Bahagia saya punya pimpinan yang bijaksana ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Pimpinan Komisi VIII yang saya hormati;

Ketua dan para Wakil;

Anggota semua yang saya muliakan;

Saudara Dirjen Haji dan rombongannya;

Saudara Kepala BPKH dan rombongannya.

Rombongan haji semua itu, *Insyah Allah*.

Baik, saya langsung saja.

Yang pertama, soal akurasi data. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Pimpinan, Pak Marwan Dasopang, Pak Azis, saya mohon ini betul-betul inilah, menjadi pelajaran terakhir soal akurasi data itu. Kita bahagia, kita bangga, punya Menteri Agama yang konsern dan perhatian utamanya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, misalnya ingin menyelenggarakan haji yang betul-betul dengan layanan prima. Itu tentu butuh dukungan dari banyak pihak, termasuk Komisi VIII. Saya minta teman-teman di Dirjen Haji ini dalam mengolah data untuk disampaikan ke Menteri, itu betul-betul matang, karena itu bisa mempengaruhi kualitas komunikasi Menteri ke Komisi VIII. Ketika konten komisi itu berbasis data yang tidak akurat, nah itu bisa menimbulkan salah persepsi teman-teman di Komisi VIII, jadi nanti *ruwet* urusannya. Oleh karena itu tolonglah itu soal akurasi data ini betul-betul menjadi konsern dari teman-teman di Direktorat Jenderal Haji.

Saya kasih fakta misalnya, sampai 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Kakan Kemenag disalah satu kabupaten di Jawa Tengah, dia bilang bahwa di kabupaten yang dia pimpin masih 4 orang dicari, gitu. Meskipun ada alamatnya jelas, tetapi ketika didatangi itu tidak ada. Itu masih 4 orang dicari, itu di satu kabupaten. Lalu di kabupaten yang lain ada 17 orang yang masih dicari misalnya. Tapi kemarin Pak Menteri dengan *pede* bilang ini sudah selesai semua, lebih. Inikan pasti yang salah teman-teman Direktorat Jenderal Haji ini pasti. Itu jangan diulang lagi lah, kasihan Pak Menteri, Pak, kasihan Pak Menteri kita yang hebat itu.

Yang kedua soal pesimisme BPKH, yang tadi bilang 2027 minus, artinya dana manfaat habis. 2027 itu kalau tidak salah tahun di mana Bapak-bapak semua ini berakhir. Kan ini periode 2022-2027 kan, enak sekali itu diujung periode, lalu barang habis semua. Itukan kasihan periode yang baru.

Bahwa ada fakta-fakta ada proyeksi seperti ini *oke* dibuka ke kita. Tetapi juga teman-teman harus bisa menyajikan optimisme-optimisme yang dibangun berdasarkan rancangan inovasi-inovasi pengelolaan dana ini seperti apa, sehingga kalau ini kemudian *merembes* ke luar informasinya ini pasti bikin gaduh, publik akan "*Iho piye iki, 2027* duit kita habis" misalnya, "bagaimana haji kita tahun 2027". Kalau tidak ada misalnya, *oke* itu kalau begini. Tetapi kalau begini aman. Kalau begini lebih aman lagi, misalnya. Kalau hanya menghadirkan ketakutan dan pesimisme sebelum akhir periode 2027, kalau memang tidak bisa bikin inovasi, kreasi, terobosan, untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena ini resikonya akan membuat *distrust* publik ke pemerintah juga *Iho Pak*, BPKH berkontribusi menurunkan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah juga. Nah kalau itu yang terjadi sebaiknya Bapak-Ibu berhenti saja sekarang kalau memang tidak mampu melakukan apa-apa, kecuali menghabiskan *duit* itu. Karena ini urusannya bukan hanya dunia, ini urusannya akhirat.

Yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan penambahan kuota 8.000 tadi itu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen. Saya sebagai Anggota Komisi VIII, sebagai Anggota Fraksi PKB, tentu setuju bahwa konsekuensi penambahan biayanya tentu kita harus penuh. 288 sekian miliar itu, *oke* setuju.

Kemudian yang kedua, kalau memang diperlukan, dibutuhkan untuk selisih anggaran yang kemarin akibat dari akurasi data teman-teman di Kementerian Agama yang juga tidak benar itu, yang jama'ah haji tunda itu, yang kemudian konsekuensi pembiayaannya sekitar 232 miliar, jika itu memang itu diperlukan persetujuan kami, di Komisi VIII, untuk nanti bisa dicantumkan di Keppres tentu kami juga mendukung dan setuju sepenuhnya. Yang penting bagi saya adalah pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan, lancar, tertib, prima layanannya. Tetapi PR kita ke depan adalah, bagaimana secara serius Komisi VIII, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BPKH, untuk mencari terobosan-terobosan, sehingga publik tidak dibayangkan bayangi 2027 dana haji habis. Kalau habis kasihan, Pak Ketua. Terutama yang belum, lansia. Kayak model-model kayak saya inikan kasihan, Pak Ketua, harapannya habis. Kalau sudah lansia kan mungkin sudah dekat itu.

Baik, demikian, terima kasih tambahan dari saya.

*Walloohulmuaafiq illaa aqwaamith thooriq.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih banyak, Pak Luqman, dari Fraksi PKB.
Selanjutnya kita persilakan Fraksi Demokrat.
Tidak ada lagi *ya*?
Kita pindah ke Fraksi PKS, lanjut.
Silakan Pak.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

01.17.45

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Terima kasih

Pimpinan;

Teman-teman Anggota Komisi VIII dan dari;

Kementerian Agama, Dirjen dan seluruh jajaran, dan juga dari;

Badan Pengelola Keuangan Haji.

Singkat, PKS tentang penambahan kuota ini tetap dipakai ya, dipakai seoptimal mungkin, karena kasihan juga jama'ah yang sudah puluhan tahun mendaftar. Cuma kalau sikap anggaran, PKS seperti sikap apa namanya, seperti PAN pada kisah itu, "dimakan mati air, tidak dimakan mati ibu", khusus dibidang anggaran. Karena saya lihat, kemarin Kementerian Agama salah *ngitung*, harus kita tambah lagi sekitar 200. 200 atau 300 ya? 313 ya.

Kemudian sekarang ada lagi penambahan anggaran. Lama kelamaan saya lihat arus kasnya BPKH itu tidak sehat ya. Kenapa saya tidak bilang sehat, seharusnya kan memang undang-undang membolehkan untuk menambah subsidi itu dari arus kas berjalan. Tapi ini saya lihat arus kas berjalan juga sudah ke makan, gitu ya. Nah ini saya melihat lama-lama BPKH itu tidak sehat.

Tapi saya agak, agak aneh juga saya lihat BPKH sekarang itu *kok* patuh banget sama Kementerian Agama, begitu ya. BPKH dan Kementerian harus apa ya, terlalu dekat juga tidak boleh, terlalu jauh juga tidak boleh. Kalau terlalu, dekat nanti apa, nanti apa namanya, main mata dalam kebijakan, terlalu jauh juga nanti tidak bisa berkolaborasi. Jadi seharusnya BPKH harus tahu posisi ini.

Seharusnya kalau ada permintaan anggaran yang *menggerus* nilai manfaat yang akan dipakai oleh jama'ah haji akan datang, harusnya BPKH itu harus kritis, gitu ya, harus kritis. Karena dia kan apa, seperti yang dibilang Saudara kita tadi, ke depan ini cita-cita BPKH untuk menormalisasi anggaran antara keuntungan dalam tanda kutip dengan pokok itu, semakin jauh. Apalagi kebijakan Saudi Arabia yang makin hari makin, makin apa ya?, makin 'gila' kalau saya bilang ya, makin gila. Kenapa?, kemarin itu kita lihat di *e-hajj* itu, biaya untuk jama'ah haji *furoda* itu di Arofah-Mina itu sudah naik lagi, dari 14.000 jadi berapa itu?, 22.000 riyal untuk di Arofah-Mina.

Kemudian juga dari 500 asuransi sudah menjadi 1.500 jama'ah *furoda*. Tidak tahu nanti, tiba-tiba Menteri Agama datang lagi ke Komisi VIII minta uang lagi, tambah lagi, ada naik di Saudi, jadi lama-lama Kementerian Agama juga apa ya, bingung juga melihatnya. Jadi ini, Pak Ketua, saya lihat ini lama kelamaan, mendekati seperti *ponji* lama-lama, karena tidak normal itunya. Dari dulu itu saya mengusulkan supaya sistem *virtual* yang sebenarnya diterapkan di BPKH. Disitulah kita tahu setiap jama'ah haji berangkat dengan

memakai dari uang dari dia dan keuntungan dari dia. Tidak boleh jama'ah haji yang akan datang, jama'ah haji yang sekarang, akan memakan keuntungan yang diproyeksikan untuk tahun depan.

Inikan masalah-masalah *syari'at* yang tidak diperhatikan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama juga yang begitu tutup mata saja. Ya memang enak ya sekarang ini, "ah saya menteri kan cuma 2 tahun lagi, habis saja uang dana itu". Tapi jama'ah haji yang akan datang bagaimana?, dia harus mensubsidi nanti, harus nambah lagi. Jadi ini saya minta ini BPKH ini juga dekat-dekat, tapi harus tegas. Nanti kalau kita DPR tegas, kan dianggap, Kementerian Agama dianggap kita apa begitu.

Jadi ini saya lihat, Pak Ketua, ini tidak sehat ini. Dan apa program BPKH ke depan untuk menormalisasi anggaran, itu belum jelas sampai sekarang. Dulu kita bilang umpamanya biaya setoran awal ditambah, sampai hari ini tidak ada beritanya, iya kan?. Kemudian supaya harga-harga di Saudi dimurahkan, tidak jalan juga. Saya di telepon oleh kedutaan Turki, dia bilang "bodoh Indonesia". Kenapa?, di Saudi semua hotel itu ada disitu restoran, dan ada dapur. Jadi kalau kita membeli makanan di restoran itu lebih murah. Dan kita tidak perlu, selama ini jama'ah Indonesia sebelum Arofah tidak ada makanan, dua hari-sehari tidak ada makan, aneh gitu. Orang mau haji itukan harus makan, masa tidak makan. Itu penyebabnya, karena restoran-restoran di Saudi sudah tutup karena ke Arofah, itu kelemahannya, kenapa kan kita tidak memakai restoran yang ada di, di gedung-gedung ini.

Dan sekarang saya berpikir ya, saya kemarin di jama'ah Tapanuli Selatan, 70% lansia. Aduh, saya tidak ke bayang ya. Indonesia jama'ah terbesar di dunia, secara ekonomi kita paling kuat. Tetapi secara peran, kita paling lemah. Kenapa?, semua jama'ah haji yang paling jauh Indonesia, 7 kilometer. Yang dekat-dekat itu adalah orang-orang yang lain, dari Arab, atau jama'ah-jama'ah VIP. Masa kita di bawah Pakistan begitu ya.

Jadi ini juga mau mengatakan, bahwa ke depan mungkin perlu kita bicara yang serius ini, Pak Ketua. Jadi kasihan juga jama'ah haji kita seperti ini. Nah kita sekarang dihadapkan juga penambahan jama'ah haji kita terima, PKS akan terima. Tapi penambahan dana itu, saya dulu sudah saya bilang sebelum, kalau kita dapat tambahan haji, bagusnya kita serahkan kepada jama'ah khusus, karena tidak memakan dana dari keuntungan, gitu. Karena jama'ah khusus itu lebih bebas, mereka mau bayar sesuai dengan harganya, ya. Nah ini mungkin kalau bisa, Pak Ketua, kita kurangi saja sebagian.

Mungkin sebagian ini kita serahkan kepada jama'ah khusus untuk mengurangi biaya *virtual*, biaya-biaya keuntungan tadi. Kalau sekarang sih enak, Menteri Agama kan kalau nambah juga 200-400 ribu, keluarin saja 10 triliun. Tapi kedepannya bagaimana?, iya kan. Tapi semua usulan kita sampai sekarang BPKH tidak ada yang dikerjain *kok*. Kita suruh ditambah apa, setoran awal biar uangnya lebih besar, dan supaya keuntungannya. Belum ada sampai hari ini, apa namanya, apa, jalan ke sana belum kelihatan. Terus bagaimana meningkatkan keuntungan.

Katanya di BPKH itu mendapat 8% dari Sukuk. Itu memang ada beberapa item yang dapat 8%. Tapi kalau saya hitung semua semuanya, tidak ada 8% juga, sekitar 6% juga. Jadi kita ini jadi apa ya, seperti kucing-kucingan juga sekarang ini. Jadi ini barangkali ya, mohon maaf Pak Ketua, ini keluh kesah dari PKS ini, ini masalah, ini masalah moral menurut saya. Kita harus mengamankan jama'ah haji yang akan datang itu sebagai langkah moral kita. Politik itu moral. Kalau saya mau bebas saja, sudah kasih saja semua juga, tidak ada pusing kan.

Tapi kasihan teman-teman nanti yang terpilih lagi, berarti kan dia bertanggungjawab untuk ke depan, kan kalian yang ikut menandatangani. Tahun sekian, ini tahu sekian, semua ada catatannya, ada namanya jejak *virtual*-nya, jejak teknologinya semuanya ada. Jadi kasihan juga teman-teman nanti. Pak Ali nanti terpilih lagi 10 tahun lagi, kenal kawan ini ya.

Jadi itu saja barangkali, Pimpinan. PKS tetap menerima ini sebagai tanda empati PKS terhadap jama'ah haji yang sudah lama antri. Tapi tolong biaya-biaya haji ini jangan terlalu murah kita melepaskannya, ya.

Terima kasih, Pimpinan.

01.26.44

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih banyak Pak, saya kira.

F-PKS (H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Boleh menambahkan?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Iya memang selama skema investasi BPKH masih seperti ini saja, saya kira memang kita akan mengalami masalah ke depan. Nah saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Luqman, Pak Iskan, tadi saya kira memang perlu menjadi catatan khusus BPKH untuk mencoba melakukan inovasi investasi, Pak.

Yang kedua, selama juga skema subsidi dana manfaat BPKH itu seperti hari ini, itu juga akan menyulitkan BPKH. Jadi mungkin ya ke depan kita harus pertimbangkan bahwa apakah subsidi itu masih seperti hari ini?, atau cukup dengan angka 20%?, seperti apa?, itu kan perlu dipertimbangkan bersama Pak, dalam rangka untuk keberlanjutan. Tapi yang pasti hari ini saya kira hampir semua fraksi setuju, agar kuota 8.000 ini betul-betul bisa kita isi, jangan sampai ada yang tidak termanfaatkan.

Mungkin memang yang menjadi dipikiran kita semua, kira-kira kalau 8.000 ini tidak terserap, seperti apa langkah berikutnya yang bisa kita tempuh, atau solusi apa, sehingga jangan sampai ada yang tidak terisi, gitu kan.

Apalagi dengan antrian haji yang begitu Panjang Pak, luar biasa. Kalau di Sulsel ini Pak kalau hari ini Bapak *ngasih* 5.000, habis itu. Saya dengar Sulsel dapat kuota dua kloter, itu sudah terisi satu kloter. Tinggal satu kloter yang Bapak isi nanti. Di Makassar itu 43 tahun Pak, Bantaeng 47 tahun itukan, satu.

Yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Luqman tadi tolong dijelaskan nanti kembali Pak menyangkut masalah kuota yang sudah terserap semua itu, apa betul masih ada yang belum terserap?, atau kalau sudah terserap seperti apa? Itu mungkin yang mau didengar teman-teman. Karena memang faktanya di lapangan masih banyak kabupaten, di mana kandepagnya itu tidak menemukan jama'ah haji itu. Ada yang sudah mungkin meninggal, ada yang sudah jadi TKI, ada yang sudah pindah ke provinsi lain.

Tapi setiap tahun masih masuk dalam Siskohaj, itukan bikin repot juga kita. Itu mungkin perlu dievaluasi pasca musim haji nantinya, kita buka data itu. Jadi yang sudah dua-tiga musim haji tidak pernah ada orangnya, ya sudah kita masukkan dalam *list* tersendiri ya, sehingga tidak mengganggu kuota-kuota jama'ah yang lain saya kira.

Yang terakhir dari Fraksi PKS.

F-PKS (H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Nambahin, nambah, PKS, sedikit.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Boleh Bu, boleh.

Tapi saya perpanjang dulu ya. Tadi kita 15.30 ya?.

Saya perpanjang sampai 14.30.

**(WAKTU RAPAT SETUJU DIPERPANJANG)
(KETUK PALU 1 KALI)**

F-PKS (H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Mohon maaf, 16.30.

F-PKS (H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.):

Pimpinan;
Seluruh Anggota Komisi VIII;
Bapak Dirjen PHU, dan;
seluruh Bapak Pelaksana BPKH, dan;
Semuanya yang hadir.

Menambahkan saja. Kalau dalam rincian yang disampaikan oleh Bapak Dirjen PHU, ini yang saya baca belum ditemukan pembayaran DAM. Jadi kan haji *tamattu* itu harus *ba'dal hadyu*, begitu kan?. Ini nanti bagaimana?, apakah memang sudah ada alokasi anggaran atau belum?. Kalau yang saya baca, belum ada begitu. Nah ini padahal nanti tentu banyak itu haji Indonesia yang *tamattu* hajinya.

Terus kedua, karena *tag line*-nya haji sekarang itu haji ramah lansia, ini tentu memang lansia banyak ya, hampir mungkin ya ada 30% begitu ya, itu dari dapil itu banyak menyampaikan, tolong apakah dengan haji ramah lansia ini kemudian nanti biasanya yang orang-orang *sepuh*, itukan memerlukan apa namanya, maaf, toilet, pengadaan toilet itu yang harus mendapatkan perhatian.

Ini saja yang perlu saya sampaikan.
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih banyak, Ibu Azizah.
Selanjutnya siapa ini?.
Pak Yandri, silakan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Izin, Pak Ketua.
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Saya atas izin senior saya, Pak Asli Chaidir.

Yang saya hormati, Pak Ketua dan Pimpinan Komisi VIII;
Para Anggota yang terhormat;
Pak Dirjen dan;
Kepala BPKH beserta seluruh jajaran.

Agenda hari ini sangat penting untuk kita ambil sebuah kebijaksanaan yang bijak. Dan keputusannya tidak boleh menggantung, karena waktu sudah tidak ada lagi. Sebuah kepastian penting kita putuskan pada hari ini secara bersama-sama. Nah saya ingin memulai pertama kuota 8.000 itu wajib

hukumnya dihabiskan, wajib itu. Karena jangan sampai seperti tahun lalu 10.000 kita kembalikan, begitu ya Pak Dirjen ya. Nah 8.000 itu tentu ada akibat konsekuensi dari 8.000 itu. Tadi saya dengar dari Pak Fadlul, itu bahwa ketika kita raker perbandingan nilai manfaat dan BIPIH itu, 55-45. Ketika masuk hitungan lunas tunda dan 8.000, itu akan bergerak ke 51,9 dengan 48,10.

Kemudian ada uraian juga, ada kemungkinan 2027 tadi, nilai manfaat itu akan menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, Pak Dirjen dan BPKH, saya kira perlu keberanian kita, jama'ah haji ini menjadi tanggung jawab kita saat ini dan yang akan datang, *gitu*. Oleh karena itu saya berharap kebijakan kita itu benar-benar tidak pada tataran ambil gampang, kira-kira begitu. Tapi kita ingin memikirkan bagaimana keberlanjutan proses haji ini ada keadilan. Adil itu berarti tidak mengganggu tahapan haji yang berikutnya. Apalagi misalkan bahkan akan menjadi persoalan besar jama'ah haji yang 5 juta orang itu, ada kemungkinan tidak bisa berangkat. Bisa seperti kasus *First Travel*.

Nah kemudian yang kedua, dari 8.000 itu, saya kira, saya kemarin *ngisi* manasik haji di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, saya sudah laporkan ke Pak Dirjen dan Pak Menteri, memang ada jama'ah haji itu yang tidak mungkin didampingi oleh petugas haji, tidak mungkin. Dia mesti harus didampingi dengan *mahrom*-nya, keluarganya, *gitu*. Bayangkan yang di Cilegon itu saya panggil ke depan, bawa kursi roda, kursi rodanya tidak bisa dia dorong, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia berangkat. Kalau petugas haji kan tidak mungkin tidur sama dia, masangin *pampers* dia, buka celana dia, tidak mungkin, kalau bukan keluarganya.

Maka usul saya, dari 8.000 itu, berapa yang mesti kita keluarkan untuk pendamping Pak Dirjen?. Kita juga tidak adil, tidak bijak juga kita kalau misalkan "sudahlah yang penting mereka berangkat, nanti urusan lain, nanti petugas haji yang memang sudah kita latih untuk lansia", saya kira itu tidak akan maksimal. Jadi memang ada lansia yang mandiri yang mungkin pendampingannya bisa kita kategorikan bisa dengan petugas haji, tapi ada lansia yang memang harus melekat 24 jam keluarganya. *Nah* itu menurut saya perlu data dan apa namanya ya, kebijakan yang sungguh harus kita benar-benar ambil sehingga tidak ada menimbulkan persoalan.

Jadi usul saya, Pak Dirjen, dari 8.000 itu, berapa yang kita peruntukkan untuk pendamping lansia?. Seperti yang apa namanya, kursi roda yang 24 jam mesti didampingi, ada yang umurnya hampir 100 tahun, tapi tidak bisa *ngapa-ngapain* kalau bukan dibimbing atau dituntun, dan sebagainya. Saya kira dari masing-masing kanwil sudah ada laporannya, itu berapa?, kita minta dengar nanti dari Pak Dirjen. Saya kira ini menjadi fokus kita, karena kalau itu tidak kita lakukan, saya kira ini akan menjadi persoalan serius, dan kita termasuk yang tidak bijak dalam mengambil kebijakan, *nah* itu dikeluarkan dulu.

Kemudian yang kedua, eh yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada BPKH. Jadi uang BPKH itu ya uang umat, uang jama'ah, *gitu loh*.

Bukan serta merta kita habiskan untuk musim haji sekarang, tapi bagaimana kita memikirkan keberlanjutan dari haji kita. Maka menurut saya, skema keuangan BPKH itu mesti *fair*, menurut saya. Artinya kalau misalkan mengganggu tahapan haji berikutnya, harus ada lampu kuningnya, Pak Fadlul, karena kalau semuanya kita *loss*, berarti kita ikut berdosa juga tuh, seolah-olah kita tidak paham masalah kan, "sudah uang ada kita pakai saja", ternyata 2027 habis ini duit, dan sekarang belum ada konsep yang bisa kita lakukan.

Oleh karena itu, menurut saya, kita harus memulai keberanian, Pak Dirjen, memulai keberanian BPKH. Mulai adanya kuota 8.000 itu, menurut saya, *pemantik* kita untuk mengambil langkah berani, Pak Dirjen. Karena tahun depan itu bisa jadi tambahannya 20.000, bisa jadi, 15.000 bisa jadi. Itu mau kita apakan barang ini kalau tidak kita memulai dari sekarang mencari solusi yang terbaik, yang bijak menurut saya tadi, maka angka 8.000 itu harus habis. Tapi keuangan BPKH kan harus sehat. Dan ini pesannya harus sampai ke masyarakat, Pak, harus sampai ke jama'ah haji, bahwa ada yang harus kita selamatkan, yaitu keuangan haji, yang belum berangkat. Maka usul dari beberapa teman tadi saya kira sudah sangat bagus, artinya kita tidak perlu apa namanya *ya*, terlalu mengenakan banyak orang.

Sebenarnya kita sedang memberikan penyakit terhadap pelaksanaan ibadah haji kita. Nah apa yang saya maksud?, terhadap kuota tambahan ini, *ya* dengan Pak Iskan Qolba tadi ada usul misalkan, "sudahlah yang utamakan pendamping lansia berapa, sisanya *full* tidak ada subsidi". Ini menyelamatkan, Pak Fadlul. Kalau tidak kita pesan saya seperti dana kita ini banyak sekali itu. Artinya kalau tahun depan ada tambahan 20.000, bahkan 30.000, kita sudah siap, untuk menghabiskan anggaran dengan pola yang kita ambil hari ini walaupun pahit. Nah usul saya dari 8.000 itu, karena kalau 238 miliar ditambah 331 hampir setengah triliun lebih, yang harus dikeluarkan oleh BPKH, dan itu tidak sehat Pak, tidak sehat Uangnya ada sekarang, tapi ke depan bermasalah. Maka mulailah kita itu dengan cara yang bijak menurut saya, harus berani.

Kita syukur dapat 8.000, tapi jangan 8.000 menjadikan kita *boomerang*, gitu loh. Kita seolah-olah senang dapat 8.000, ternyata kita justru menggali kuburan kita sendiri, ini tidak boleh, Pak. Oleh karena itu usul saya, berapa kira-kira hitungan yang paling rasional dari BPKH, yang harus diambil dari nilai manfaat?. Yang paling sehat Pak, yang paling sehat. Apakah 4.000?, apakah 5.000?, atau berapa?. Sisanya *ya* sudah ke haji khusus atau apa skemanya?, yang tidak mendapatkan subsidi dari nilai manfaat, gitu loh.

Karena kuota tambahan inikan sebenarnya kebijakan Kementerian Agama dengan persetujuan DPR kan. Tinggal kita bagaimana, mau apakan barang ini. Tapi jangan juga jadikan isu 8.000 ini, tidak akan kita ambil, karena uang BPKH tidak ada, itu tidak boleh juga, Pak Dirjen Haji, ini juga akan heboh republik. Gara-gara keuangan BPKH tidak ada, 8.000 tidak diambil, ini tidak boleh. Nah maka tolong komunikator dari Kementerian Agama dan BPKH ketika ke publik itu musti tepat mencari kata-kata, tepat dalam mencari pilihan kalimat, bahwa 8.000 ini bagaimana-bagaimana, sehingga

kebijakannya begini. Termasuk mungkin pimpinan komisi atau kita-kita yang menjelaskan kepada publik. Maka usul saya coba dihitung. Kalau menurut saya 550 miliar itu tidak masuk akal itu, Pak. Uangnya sekarang betul ada, tapi 2027 menjadi persoalan, dan kita ikut berdosa. Saya termasuk yang tidak setuju itu.

Tapi kalau misalkan bahasa kita, “ya karena keuangan haji tidak ada”, itu juga tidak boleh kita sampaikan begitu. Tapi untuk menjaga kesehatan keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji, maka kita ambil skema begini. Maka coba mumpung rapat sedang berjalan, kira-kira yang paling rasional, Pak Fadlul, kira-kira angka 8.000 itu berapa yang bisa disubsidi oleh BPKH?. Karena angka 331 miliar itu tidak masuk akal, Pak, kalau semua kita tumpahkan. Setiap ada tambahan kuota kita tumpahkan ke BPKH, setiap ada tambahan kuota kita mintakan kepada nilai manfaat, saya kira tidak akan sehat.

Nah maka mohon dihitung betul yang berapa bisa diambil dari nilai manfaat yang paling sehat. Karena inikan tonggak, Pak, Pak Amri, inikan tonggak kita, kita memulai, karena tahun depan itu mungkin tambahan kuota akan lebih banyak. Tapi kita harus memulai skema, gitu loh. Jangan setiap bertambah “sudahlah ambil duit saja dari BPKH”, ada tambahan ambil lagi dari BPKH, *jebol* kita Pak, dan tidak adil itu Pak. Kita sudah tahu tidak adil, tapi kita lakukan, kan *dzholim* namanya itu.

01.41.45

Nah oleh karena itu mohon dipertimbangkan Pak Dirjen. Karena tambahan kuota itu kebijakan dari Kementerian Agama persetujuan DPR, saya kira kita sama-sama untuk keberlangsungan ibadah haji kita, tolong Pak Kepala BPKH dihitung sama Pak Dirjen, kira-kira kebutuhan pendamping lansia itu berapa yang paling wajib?, atau yang sudah lunas tadi yang mungkin diambil usia yang agak lanjut, kemudian yang sisanya yang tidak mungkin disubsidi dari nilai manfaat, kasihkan ke haji khusus, Pak. Apakah skemanya 4.000-4.000?, atau 6.000-2.000?, atau 5.000-3.000?, saya tidak tahu. Tapi intinya kita harus mengurangi dan memulai, bahwa penambahan kuota itu kita syukuri, tapi jangan kita menggali kuburan sendiri Pak.

Jadi saya kira itu dari kami, sehingga kemanfaatan kita rapat ini benar-benar, bukan untuk hari ini saja Pak, tapi untuk ke depan. Iya mungkin saya belum tentu juga ke depan di Komisi VIII, atau Pak Dirjen belum tentu juga menjadi Pak Dirjen Haji, atau Bang Kahfi belum tentu juga jadi Ketua Komisi VIII, atau Pak Ace, semuanya belum tentu di sini kita Pak. Tapi kita ingin menorehkan sejarah, ingin menorehkan kalimat yang baik buat bangsa ini Pak, bahwa kita tidak meninggalkan sesuatu yang bermasalah.

Dan kita harus berani, harus kita berani Pak. Karena kalau tidak berani ya kita justru memandam *bara api* yang akan meledak di suatu hari, ternyata orang akan mengenang “oh dulu Pak Dirjennya itu yang bikin masalah, oh dulu ketua komisinya itu yang bikin masalah”, itu kita tidak mau dikenang oleh sejarah sebagai bagian dari *problem* kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya persoalan haji Pak. Jadi mohon BPKH dihitung betul. Jangan

sampai 550 miliar ini, sepertinya sehat ternyata kita sudah kronis sakitnya Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

F-PAN (H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H.):

Nambahkan sedikit.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Pak Yandri.
Silakan Pak.

01.43.40

F-PAN (H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H.):

Terima kasih.

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat pada hari ini;
Yang saya hormati, rekan-rekan Anggota Komisi VIII;
Yang saya hormati, Dirjen PHU;
Kepala BPKH, dan;
Seluruh jajarannya.

Saya sedikit saja, karena sudah, kalau sudah waketum kami yang berbicara, yang bawah-bawah ini sedikit-sedikit saja lagi Pak. Kalau melampaui pula dari waketum nanti kena sanksi saya nanti, selesai sudah ya.

Saya lanjut saja, Pak Ketua.

Dalam paparan Dirjen PHU, disampaikan bahwa hingga periode pelunasan berakhir, sisa kuota yang belum melunasi adalah sebanyak 24.276 jama'ah. Selanjutnya untuk mengisi sisa kuota yang belum melunasi tersebut, akan diisi oleh jama'ah haji cadangan yang telah melunasi sebanyak 24.276 itu, sehingga bersisa 576 jama'ah yang statusnya masih tetap sebagai cadangan, padahal kuota normal.

Selanjutnya mestinya Dirjen PHU sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ada lima kategori yang berhak mendapatkan sisa kuota, yaitu penggabungan *mahrum*, penyandang disabilitas, dan pendampingnya jama'ah haji lansia dan pendamping jama'ah haji lunas tunda, dan jama'ah haji pada urutan berikutnya.

Selanjutnya Dirjen PHU membagi sisa kuota ke berapa provinsi, sehingga justru menimbulkan ketidak-adilan bagi provinsi lain. Harapan kami ada kebijakan yang konsisten dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dan selanjutnya dalam paparan BPKH, dijelaskan bahwa terdapat sisa akumulasi nilai manfaat sebanyak 13,6 triliun, yang artinya bahwa anggaran cukup tersedia untuk penambahan 7.360 jama'ah. Namun yang perlu diperhatikan adalah, bahwa BPKH semestinya mempersiapkan bahwa setiap tahun itu akan terjadi penambahan kuota setiap tahun, sehingga dapat mempersiapkan khususnya pemenuhan mata uang dollar untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Dirjen PHU untuk memastikan layanan bagi jama'ah haji yang menjadi kekurangan pada tahun lalu, seperti pesawat *delay*, itu dapat segera diatasi sedini mungkin, dengan koordinasi dengan maskapai penerbangan Garuda dan Saudi Airlines, agar tidak menjadi beban tambahan yang melelahkan bagi jama'ah haji dan pelayanan bagi lansia.

Terakhir, ini yang setiap tahun haji terus dari dapil kami itu banyak keluhan tentang jumlah dari satu kamar itu berapa orang yang diisi?. Ini kalau sudah di Saudi itu, kalau sudah terjadi kan tidak bisa di tolong lagi. Makanya biar jadi saksi bersama, saya karena berkali-kali kita minta keterangannya, kan ini dasar daripada penghitungan jumlah anggaran kan dari jumlah kamar yang dibiayai, iya mungkin kabarnya dulu 4 orang satu kamar. Ternyata banyak laporan yang melebihi dari 4 kamar tersebut, makanya ruang *space*-nya dari pada jama'ah itu sangat tidak, tidak sempurna lagi dan tidak nyaman bagi jama'ah.

Dan juga kepada Badan Pengelola Keuangan Haji saya cuma menambahkan. Mohon maaf, Ketum, kalau saya salah. Memang BPKH ini kalau tidak bisa mendatangkan manfaat kepada jama'ah, mungkin BPKH ini akan hilang dari peredaran, kalau tidak ada manfaatnya. Jadi makanya secara profesional, berapa persentase yang mungkin secara terus menerus tidak ada ditambah, tidak ada kurang lagi, mungkin *dipatok* yang memungkinkan saja, biar nanti juga tidak bisa nantinya tidak akan bisa menalangi orang berikutnya yang kita juga mengharapkan orang berikut yang sebelum itu juga bisa terbantu dalam nilai manfaat tersebut.

Demikian, Bapak semuanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Sekali lagi, mohon untuk supaya kita berada bersama-sama di tentang permasalahan pelaksanaan haji ini. Tentu Badan Pengelola keuangan Haji harus siap, dan PHU harus siap, untuk tidak boleh tidak bisa berangkat seluruh calon jama'ah haji yang telah ditentukan. Karena orang menunggu sangat lama, tahu-tahu ada dalam berita nanti, ada yang tidak berangkat haji dari pada kuota yang telah diberikan.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih, Pak Asli. Sehat terus Pak.

Saya kira kita sependapat ya, bahwa jangan sampai kebijakan yang kita buat hari ini itu akan menimbulkan masalah bagi jama'ah ke depan. Tetapi saya kira kita juga sependapat, bahwa jangan sampai kita buat kebijakan justru bermasalah bagi kita, itu yang perlu kita hati-hati betul. Saya kira itu catatan saya.

Saya kira semua fraksi sudah. Ada yang sudah dua orang per fraksi. Ada Pak Kyai Maman baru datang.

Siapa yang saya mau kasih ini, Golkar kiri-kanan minta ini.

F-GERINDRA (DRS. H. ZAINUL ARIFIN):

Saya dari tadi ini Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Ya bapak dululah, Pak Zainul.

F-GERINDRA (DRS. H. ZAINUL ARIFIN):

Ya itu baru.....

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan Pak, silakan Pak.....

F-GERINDRA (DRS. H. ZAINUL ARIFIN):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kita kasih semua, silakan.

F-GERINDRA (DRS. H. ZAINUL ARIFIN):

Terima kasih, Pak Ketua.
Ini cuma dua kata, sedikit.

Yang saya hormati, Pak Ketua Komisi dan;
Seluruh teman-teman Anggota Komisi VIII;
Pak Dirjen dan;

Kepala BPKH yang saya hormati pula.

01.51.16

Saya ingin melanjutkan pertemuan 3 hari yang lalu itu, saya mengusulkan ada 10 orang, ada 10 orang yang sudah setor 10 tahun, sudah setor 10 tahun, tapi sampai hari ini belum ada perhatian. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan?. Ini dia ini, mereka ini hanya sudah bicara masalah Komisi VIII:

“Kenapa diam saja, kami sudah puluhan tahun ini menunggu?. Kalau di Bima jangan diharap, tidak ada mungkin bisa kita terobos. Hanya Pak Haji Zainul yang ada di DPR, apalagi sudah di Komisi VIII”

Ini saja yang saya ingin sampaikan.

Saya mohon petunjuk dari Dirjen dan BPKH.

Terima kasih banyak.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih banyak, Pak Zainul.

Saya kira apa yang Bapak alami itu hampir sama, kami juga alami Pak. Bukan 10 tahun Pak. Mendaftar 2012, ternyata belum bisa, berarti sudah 11 tahun. Karena ternyata kuota tambahan ini diprioritaskan untuk 2011. Itupun tidak semua daerah sama Pak, tergantung jumlah antrian dan jumlah jama'ahnya *gitu*.

Selanjutnya saya persilakan Ibu dulu.

Bergilir saja dulu, silakan.

F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.AG., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan, atas tambahan waktunya.

01.52.59

Jadi ketika tadi dipaparkan, bahwa penambahan kuota 8.000 orang ini, tentu saja bukan hanya mengenai masalah tambahan uang yang akan diambilkan dari mana, tetapi juga, Pak Dirjen, kesiapan pelaksanaannya di masing-masing daerah, kemudian juga nanti khususnya di Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, dan di Armina. Itu kita belum mendapatkan gambaran seandainya itu nanti terpenuhi.

Kemudian yang akan menjadi persoalan adalah, jika tadi sudah disampaikan oleh BPKH, dengan asumsi 2027 kita akan minus, ini akan sangat berbahaya sekali, Pak Fadlul, karena akan membuat *resah* para jama'ah haji. Justru di sini akan memperlihatkan, “bagaimana *dong* sudah dipilih sebagai Badan Pelaksana, tapi *kok* tidak bisa optimal untuk menginvestasikan dana haji, yang mana itu cita-cita kita bahwa jama'ah haji bisa berangkat tanpa menggunakan uang jama'ah yang belum berangkat, tapi

ini *kok* malah minus”. Nah kalau ini kemudian ini diambil, jama’ah haji yang akan berangkat diambilkan dari situ, apa tidak semakin *ngeri* nanti. Bukan di 2027 lagi nanti, justru akan semakin maju, “wah bisa-bisa 2025 atau 2026 sudah minus”.

Ini tentunya akan menjadi catatan khusus, bahwa *next* setelah ini harus ada rapat dengan BPKH. Jangan sampai ini kemudian nanti akan timbul keresahan. Kita harus segera menyelamatkan keuangan jama'ah haji yang ada di BPKH. Harus segera dibahas untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga masyarakat akan tenang.

Kemudian, jika tadi jama'ah apa namanya, jama'ah yang akan diberangkatkan kuotanya 8.000 itu sistem yang sudah ada, jika masyarakat ini dilempar bebas siapa yang siap membayar?. Misalnya ini memang tidak populis, tetapi jika menunggu atau mengambil uang dari nilai manfaat ini sama-sama beresiko, mengapa tidak dilempar bebas, siapa yang berani melunasi tanpa mendapatkan subsidi? *gitu*. Karena kalau melihat ini banyak juga para jama'ah yang ternyata belum melunasi. Jangan sampai kuota itu tidak terpenuhi, kuota lama tidak terpenuhi, tambahan apa lagi, karena ini akan berharap. Bukan karena masalah tidak adilnya saya kira, tetapi bagaimana nanti kepercayaan Pemerintah Arab Saudi jika kita mendapat tambahan tidak terpenuhi, sementara yang lama saja juga belum terpenuhi. Jangan sampai disia-siakan, yang akhirnya akan menghambat *waiting list* kita semakin bertambah lama.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih, Ibu Endang.
Selanjutnya, Pak Kyai Maman.
Silakan, Pak Kyai.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Mohon maaf Pak, muter-muter saja, gini.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Ketua Komisi VIII dan seluruh jajaran Pimpinan,
serta Anggota Komisi VIII;
Pak Dirjen PHU;
Kepala BPKH dan;
Seluruh jajaran.

Yang pertama tentu ini tidak boleh menjadi *preseden* buruk ya bahwa dari tahun ke tahun kita tidak menyiapkan semacam *exciting* di kesimpulan-kesimpulan kita. Misalnya di kesimpulan itu harus tetap ditulis “jika terdapat perubahan kuota maka disesuaikan dengan sesuatu yang sudah diambil kesimpulannya”. Ini menjadi jalan keluar kita. Karena jangan sampai kita tiba-tiba melakukan perubahan ini dan kita tidak siap.

Yang kedua, tentu saya tetap memprioritaskan, bahwa karena keberangkatan kita sudah *mepet*, lalu juga semua persiapan sudah diselesaikan, maka mau tidak mau DPR harus men-*support* apa yang diminta oleh Kementerian Agama. Tapi dengan catatan, catatan-catatan yang kita temukan di daerah, itu soal, kita masih khawatir, Pak Pimpinan, dengan lansia yang begitu banyak, lalu persoalan-persoalan kesiapan mereka secara pelayanan, terutama soal psikologi lansia itu, saya melihat belum ada kesiapan yang optimal. Jadi saya minta Pak Dirjen PHU untuk meningkatkan kembali, bagaimana caranya pendampingan terhadap lansia ini menjadi prioritas pada tahun ini?.

Yang terakhir, saya minta BPKH ini, jadi perlu untuk, mohon maaf agak hati-hati dalam ber-*statement*, terutama di publik, di masyarakat. Jadi di satu sisi kita menggalakkan untuk masyarakat percaya nabung haji, lalu disimpan di BPKH. Saya termasuk orang yang keliling-keliling untuk mengatakan yakinkan bahwa BPKH apa namanya, sangat professional, amanah, dan lain sebagainya. Tetapi beberapa *statement* yang saya dengerin seolah-olah ini kita akan habis. Kan yang habis itu dana manfaatnya, bukan modal dan lain sebagainya.

Yang kedua, yang kedua menurut saya optimisme itu harus tetap dibangun. Bahwa di dalam ruangan-ruangan tertutup ini kita ingin menjaga uang jama'ah secara amanah, lalu kita ingin BPKH ini muncul menjadi lembaga yang professional. Tidak hanya mendapatkan dana manfaat hanya 6%, bahkan harus lebih. Ini yang harus betul-betul dijaga.

Saya mohon maaf *banget*, karena ada sesuatu yang di satu sisi kita meyakinkan publik, tiba-tiba publik diberi keterangan oleh beberapa pimpinan BPKH ini bagaimana kalau 2027 kita habis?, ini bagaimana kalau. Kita yakinkan bahwa uang mereka tetap aman, bahwa mereka harus bisa. Sampai saya, Pak Yandri lagi nyari-nyari hadits ini, bahwa barang siapa yang sudah nabung dapat porsi seperti itu, lalu dia diambil kembali untuk sesuatu yang *bighoiri udzur syar'i* seperti itu, karena mereka terjebak *hoax* dan sebagainya. Saya katakan, kalau mereka ambil itu untuk keperluan bukan *udzur syar'i* lalu meninggal, maka mereka meninggal dalam *mayyitatul jahiliyyah, mayyitatul yahudi wa nashooro*. Saking saya cintanya ke BPKH kan seperti itu. Tapi tiba-tiba BPKH nya bilang *wah* ini kalau tidak ini 2027 bermasalah dan lain sebagainya.

Jadi saya minta, 2 institusi terkait ini, PHU dan BPKH, membangun pola-pola komunikasi publik. Di satu sisi meyakinkan terus publik pentingnya kita menyalurkan haji ini apa, melalui program BPKH seperti ini, tapi dilain

pihak saya minta juga Dirjen PHU untuk membuat sebuah sistem yang betul-betul jangan sampai kita sudah kita putuskan, ternyata ada tambahan kuota. Orang masih bertanya kepada kita apakah, wartawanlah terutama ya, apakah kuota ini bisa terpenuhi atau tidak?, sementara kuota yang sudah ada saja tidak bisa diambil semua, dan lain sebagainya.

Jadi ini menjadi tantangan, Pak Dirjen, untuk mengatakan bahwa sebanyak apapun kuota yang diberikan Arab Saudi kita harus penuhi, dan kita jamin, bahwa pelaksanaan haji ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan amanah, professional, para pelayannya, dan lain sebagainya. Terutama untuk tahun ini poin yang ingin saya tegaskan kembali, tolong pelayanan terhadap lansia menjadi kata kunci dalam pelaksanaan haji tahun ini.

Terima kasih, Pimpinan.
Mohon maaf.

*Walloohulmuaafiq illaa aqwaamith thooriq.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih, Pak Kyai.

Saya kira memang sudah jadi rapat kemarin Pak, semua fraksi memang men-*support* agar kuota 8.000 ini betul-betul bisa terserap secara maksimal. Cuma kan tadi ada catatan-catatan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Yandri tadi, dan mungkin pimpinan yang lain nanti, mungkin akan minta ketegasan BPKH saja, sekuat-kuatnya seperti apa. Yang penting jangan dipaksa-paksa Pak, itu saja.

Selanjutnya silakan.

F-PG (DR. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.):

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

Bapak Pimpinan dan Wakil serta;
Anggota Komisi VIII yang kami hormati;
Pak Dirjen;
Pak Kepala BPKH beserta;
Staf sekalian yang berbahagia.

Ada beberapa hal sebenarnya sudah banyak sekali disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Tapi kami mungkin ingin memperkuat. Tapi sebelumnya kami ingin sampaikan pertama Pak, untuk Jambi. Saya langsung saja, saya dapil Jambi, kuota kita 2.909, sudah ya 2.909, sudah lunas 2.627, sisa kuota masih ada 2.282, cadangan 400 plus, masih kurang 129.

Harapan kami agar kekurangan ini nanti diambil dari jatah 8.000 ini kalau bisa minta tolong, kekurangan untuk melunaskan yang cadangan itu tadi. Itu pertama.

Yang kedua, Pak, saya tidak tahu kriteria lanjut usia ini sebenarnya. Ternyata setelah kami cek banyak sekali yang datang kepada kami, umur sudah 80, tapi tidak masuk prioritas. Apa dilihat dari tahun pendaftaran?, apa bukan dilihat dari pelunasan?, itu juga kami minta penjelasan dari Pak Dirjen. Dan kita juga kasihan, ada yang datang kepada kami mengatakan “kalau tahun ini kami tidak berangkat, tidak mungkin lagi, mengingat umur kami sudah tua”. Nah mungkin itu menjadi perhatian kita juga mungkin. Dan saya selalu minta dengan coba bertanya dengan kabid haji di Jambi, katanya begitu kami tanya siapa yang menentu, katanya “semuanya ditentukan oleh pusat, dari data yang ada di pusat, katanya”, itu menurut beliau.

Kemudian yang ketiga, kami sampaikan kepada BPKH, saya sangat sepakat dengan teman-teman terdahulu, tadi Pak Yandri dan yang lain-lainnya, kita jangan meninggalkan kesan yang tidak baik, pak, Pak Kepala BPKH, nanti setelah pejabat-pejabat setelah kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita menjabat?. Apakah tahun depan ini kita diterima?, atau dipilih oleh masyarakat atau tidak kan?. Ini perlu betul diperhitungkan secara matang Pak. Jangan sampai apa yang terjadi 2027, nilai manfaat sudah habis semua oleh kita. Karena kita mau ambil anaknya begitu.

Kita tidak enak, dikatakan oleh masyarakat naik haji terlalu tinggi biaya haji, padahal sebenarnya itu memang sudah ketentuan seperti itu tuh. Jadi tolong dikaji betul ini. Berapa lamalah kita ini menjabat *gitu?* Mungkin dua ribu..., mudah-mudahan masih *nyambung 2027*, ya sampai akhir. Itu tolong sekali lagi perhatian Pak Kepala BPKH dikaji secara mendalam. Dan kita perhitungkan bersama nanti, langkah apa yang tepat harus kita ambil?, sehingga ini tidak membawa dampak yang negative untuk kepentingan jama'ah yang akan datang.

Kami rasa hanya demikian, Pak Pimpinan.
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih, Pak Hasan Basri.
Selanjutnya giliran Pimpinan.
Pak Marwan dulu ya, dari sana sebelah kiri.
Silakan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya menompangi pendapat para ahlinya tadi. Ini berdasarkan Undang-Undang Haji saja, supaya ada landasan hukum kita.

Pertama, mengenai kuota haji reguler tidak terpenuhi, itu diatur di Pasal 15, Pak Dirjen. Di sini tidak disebutkan untuk cadangan. Jadi kalau ada tidak terpakai itu, "Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari, setelah 30 hari, maka diperuntukkan untuk jama'ah haji terpisah dengan *mahrom* atau keluarga". Ada yang keberatan *mahrom*-nya tidak ikut, itu yang bisa dipanggil, menurut pasal ini.

Poin b, 'jama'ah haji penyandang disabilitas dan pendampingnya'.

Poin c, 'jama'ah haji lunas tunda', baru masuk Pak, 'lunas tunda' baru masuk di sini.

'd. pendamping jama'ah haji lanjut usia;

e. jama'ah haji pada urutan berikutnya'.

Kalau begitu dari catatan kuota reguler yang tidak terpenuhi atau orang yang tidak mendaftar lunas itu, tidak ada *problem* bagi kita dengan yang disampaikan tadi, Pak Yandri. Bahwa ada yang perlu pendampingan, ada *mahrom*, karena kewajiban kita penuhi dulu itu, baru daftar pada urutan berikutnya.

Tapi kalau Pak Dirjen langsung memberikan ke cadangan berikutnya itu menyalahi dari poin-poin, loncat itu. Itu sebetulnya ada *problem* kita tentang itu, sudah ada porsinya disini, karena yang tidak melunasi itu berapa ribu tadi di sini disebutkan, ada untuk itu.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

266.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Itu setelah masuk cadangan itu Pak. Ini sebelum masuk cadangan 2 ribu berapa ini.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

24.000.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

24.276, cukup untuk itu, tidak ada masalah.

Itu tentang pasal mengenai kuota reguler tidak terpenuhi. Jadi bukan diberikan langsung ke daftar berikutnya. Kasihkan saja dulu pendamping, *mahrom*, disabilitas, dan lain-lain.

Khusus mengenai kuota tambahan. Memang Undang-Undang Haji kita ini tidak sempurna, perlu di revisi. Ada di sini, Pak Ketua,

Pasal 9, Ini Pasal 9 ini lanjutan dari Pasal 8, bukan urutan ya, tapi kontennya, Pasal 9 ayat 1 'dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji', setelah 'ditetapkan' ya, kita sudah tetapkan ini, 221.000, 'sebagaimana dimaksud pada Pasal 8' itu yang dimaksud tadi kaitannya itu Pasal 8 ayat (2) itu sudah ditetapkan.

Maka poin kedua di Pasal 9, 'ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan Menteri'.

Maka inilah yang disebutkan oleh Pak Yandri tadi itu, *tonggak* sejarah buat kita. Karena memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Haji, kalau kita merekomendasikan bahwa keuangan haji kita bisa berbahaya kalau kita subsidi dengan ada kuota tambahan. Karena di sini diatur, bahwa Menteri boleh menetapkan, bahwa kuota tambahan itu diperuntukkan untuk haji reguler, haji khusus, bisa, dengan pasal ini.

Yang ketiga, Pak Ketua, akumulasi jama'ah haji lunas tunda yang salah data, itu membutuhkan sebesar 232. Kemudian usulan kalau 7.360 jama'ah itu 288 miliar, yang artinya 500-an lebih, 500 miliar. Usulan tadi itu sebetulnya kemampuan BPKH berapa?. Saya mendengarkan rapat kita di bulan-bulan yang lalu, mengenai tambahan 232 miliar saja pun BPKH sudah mengeluh, bahwa ini sudah membuat terbalik, pembiayaan kita terbalik. Kita sudah menghindari subsidi lebih besar ditimbang BPIH, tidak bisa mengelak lagi, karena kita salah data. Jadi jangan membayangkan, Pak Yandri, jangan membayangkan 550 miliar yang harus kita hindari, tidak bisa, karena 232, wajib.

Jadi jangan lagi bicara 550, tidak. Kita bisa hanya 288, seberapa mampu dari 288 itu. Kalau bercermin dengan periode lalu, Bapak-bapak *ngotot* harus dicantumkan angka 232 ini, saya kira itu pertanda bahwa kita tidak berkemampuan. Ini proyeksi, bukan proyeksi, ini baru hitung-hitungan yang sudah nyata. Belum masuk proyeksi Pak. Kalau masuk proyeksi, bahwa jama'ah haji di tahun depan bisa saja reguler menjadi 250.000, ditambah juga tambahan 10.000. Atau andaikan saja tetap 221.000, ditambah dengan kuota tambahan 10.000, itu juga berbahaya. Atau bahkan yang sekarang pun kita tambahkan total menjadi 550 miliar, itu saya kira sudah berbahaya.

Jadi kalau kita putuskan hari ini kuota tambahan ini disubsidi lagi, dari nilai manfaat, ini menjadi landasan bagi jama'ah yang akan datang. Kalau ada kuota tambahan, semua jama'ah yang akan datang nuntut, Pak, harus kita subsidi. Nah ini harus membuat langkah-langkah. Apakah ini menyalahi? Saya kira, dari sisi Undang-Undang Haji nya tidak menyalahi di Pasal 9, sementara di Pasal 15, itu kewajiban kita sisi kuota reguler tidak terpakai.

Karena itu, saya kira, saya meyakini bahwa kebijakan kita ini tidak akan menyalahi, kalau kita berikan ke yang paling siap dan tidak merusak keuangan haji kita. Kalau menurut saya ya, jadi tidak lagi kita “ya sudah kasihkan saja ini 8.000 untuk haji khusus, tidak ada yang membebani”. Tapi karena kebijakan Dirjen Haji ini sudah memberikan kuota yang ada bagi berikutnya, tersisa mengenai penyandang disabilitas, kemudian lansia, dan kemudian yang *mahrom*, oke kita alokasikan ke situ.

Tapi seberapa besar kemampuan BPKH?. Kami ingin dibuatkan catatannya Pak. Bukan proyeksi, inikan karena sudah ada catatan uangnya, berapa itu yang bisa?, sehingga proporsinya tidak terlalu *jomplang* antara subsidi dan BPIH yang dibayarkan. Kalau terlalu jauh Pak itu kita ditertawai orang, “itu Komisi VIII itu bagaimana itu, mentang-mentang mau pemilu, kok subsidi terus” katanya. Jadi selama inipun kita sudah dicerca oleh berbagai pihak bahwa Komisi VIII tidak cermat menghitung, karena memberikan subsidi yang terlalu besar. Atau apakah keputusan kita mengenai BPIH itu memang terlalu besar?, sehingga jama’ah kita tidak melunasi dan lain-lain.

Saya kira, khusus mengenai BPKH tentu tidak bisa mengandalkan cara pengelolaan seperti ini, Pak Fadlul dan para Anggota semua, para pengurus BPKH. Harus ada terobosan baru, untuk melipatgandakan nilai manfaat yang kita dapatkan. Apakah itu penambahan daftar, daftar setoran awal?. Tetapi perlu dicatat, Pak Fadlul, dalam waktu dekat dari 5 juta jama’ah haji kita ini akan ada yang menuntut pembatalan. Karena memang di sini ada jama’ah *batu*, yang kita tidak ketahui lagi orangnya, dan itu puluhan ribu.

Jadi orang yang masa lalu disubsidi, apa namanya, bukan subsidi, ‘talangan’ Pak, dana talangan pendaftaran. Mereka daftar-daftar-daftar, sekarang tidak mau lagi melanjutkan itu, karena bunganya sudah besar kepada bank yang menalangi. Dan banknya sekarang menuntut Pak, itu harus diambil, mereka mau minta itu dibatalkan, mereka cabut yang 25 juta itu, dan itu cukup besar. Kalau itu diambil menggerus modal, Pak Fadlul. Dan itu mereka habis haji ini berencana akan masuk ke Kementerian Agama dan meminta pembatalan dan mereka Tarik, uang hajinya. Kalau itu dilakukan semakin tidak mungkin kita menutupi ini Pak.

Jadi saya setuju usulan Pak Yandri, sepanjang masih bisa ditalangi, dari 8.000 ini kita masukkan ke reguler, diperuntukkan untuk mendampingi yang lansia, *mahrom*, kemudian disabilitas, dan pendamping-pendampingnya itu. Selain itu, sudahlah supaya kita jangan terlalu rumit, kita kasihkan ke haji khusus yang sudah siap, dan ini menjadi keputusan kita berikut-berikutnya, tahun-tahun yang akan datang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih, Pak Marwan.
Selanjutnya ke Pak Ace.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

02.16.23

Terima kasih, Pak Ketua.

Ketua;
Pak Pimpinan;
Para Anggota;
Wakil Ketua MPR;
Pak Dirjen;
Pak Kepala BPKH, yang kami hormati.

Saya menangkap presentasi yang disampaikan oleh Pak BPKH ini, iya ragu-ragu gitu. Dalam pengertian ragu-ragu itu begini, tidak ingin mengatakan bahwa menolak juga tidak, siap memberikan, menyediakan uang juga tidak, gitu. Jadi bola itu dikembalikan kepada DPR, “pokoknya kami terima sajalah keputusan DPR”, kira-kira begitu.

Bagi saya, kita harus jujur terhadap kondisi obyektif yang dihadapi dalam konteks keuangan haji kita, iya. Dan menangkap apa yang disampaikan oleh BPKH, BPKH bilang kepada kita, bahwa kita sudah dikasih alarm, bahwa tahun 2027 kalau tidak ada penambahan nilai manfaat yang signifikan dari usaha dan kerja keras BPKH, akan mengalami penurunan hingga nilai manfaatnya itu nol, kira-kira itulah bahasanya. Karena itu secara *implisit* dia ingin mengatakan ‘nggak sanggup’. Saya kira bahasa tegas saja deh, gitu ya, supaya kita juga bisa merumuskan sebuah kebijakan berdasarkan atas fakta obyektif yang dihadapi dalam konteks keuangan haji.

Nah sekarang *problem*-nya adalah soal, iya saya ingin menjawab, karena yang diminta oleh Kementerian Agama ini bukan hanya soal tambahan kuota, Pak Yandri, tapi salah perhitungan yang kemarin, yang juga harus ditanggung oleh BPKH. Jadi sebetulnya diskusi kita hari ini, kenapa kemarin saya selalu mengatakan, “jangan dulu kita bicara soal tambahan dulu”, karena tambahan pun juga belum tentu BPKH mau. Jadi jangan sampai karena kesalahan menghitung, lalu kemudian menjadi beban bagi proses pengambilan kebijakan tersebut.

Nah karena itu, saya ingin ya, kita obyektif saja Pak. Saya tadi kaget dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Marwan, bahwa ada kuota *batu*, atau apa istilahnya itu?, ya kuota *batu*, di mana dana talangan-dana talangan-dana talangan, kemudian ditinggalkan oleh para jama’ah, dan jumlahnya puluhan ribu, dan menurut saya itu harus dipastikan dari sekarang oleh Kementerian Agama, karena ini menyangkut dengan *sustainability* keuangan juga. Bagaimana kalau tiba-tiba itu semua diambil oleh pihak perbankan?, “lebih saya ambil *deh*”, ya, nah itu pasti akan mengurangi terhadap uang yang tersimpan di BPKH itu.

Karena itu, iya kalau mau mengkritisi kayaknya banyak yang perlu dikritisi oleh kita, Pak Marwan. Termasuk ini saya perhatikan kenapa ini

ditampilkan terus, karena mungkin Kementerian Agama, Pak Dirjen PHU ingin mengatakan, bahwa kami sudah mempersiapkan ya, supaya kuota yang 221 ribu ini terserap semua, termasuk sudah menentukan jumlah cadangan, kira-kira begitu.

Nah kalau pun kita sudah menentukan cadangan, pertanyaannya kembali lagi kepada soal ketersediaan dari dana tersebut. Melihat dari apa yang disampaikan oleh BPKH, BPKH kelihatannya ingin mengatakan “*wah keberatan nih, 500 miliar*”, begitu. Jadi Pak Fadlun ini apa namanya, bahasanya tidak tegas lah, begitu ya, “diserahin sajalah ke DPR”, gitu.

Tapi, termasuk juga soal, misalnya di sini disebutkan kesimpulannya itu, usulannya tersebut misalnya, semua tambahan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat, baik jama'ah lunas tunda maupun dalam kuota harus dicantumkan di dalam Keputusan Presiden yang baru. *Ngurus* Keppres-nya saja bisa lama Pak, keburu nggak?, sementara tanggal 24 sudah harus berangkat?. Dengan kata lain, bahwa BPKH ingin mengatakan, bahwa “*ini ngulur-ngulur buying time* saja”, begitu. Atau kalau keluarnya tidak oleh Keppres, katakanlah kita setuju sekarang, Pak Dirjen, kita setuju, Keppresnya baru keluar 2 bulan kemudian, yang mau disalahkan siapa?, kalau terjadi apa-apa. Berlindung di bawah legalitas hukum apa?, jika misalnya apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman bahwa *sustainability* keuangan haji dinilai bermasalah.

Nah jadi kalau saya dari kesimpulan yang dibuat oleh BPKH pun, BPKH, ya hanya menonjolkan “*ini lho datanya*”. Soal keputusan politiknya diserahkan kepada DPR, itupun harus ada Keppres-nya. Ini hati-hati *lho* Pak, bisa kena semua ini, kalau terjadi apa-apa. Jadi saya paham, apa namanya, bahasa yang mau disampaikan oleh BPKH ini, ya. Nah karena itu, sekali lagi tentu bagi saya, ketika BPKH tidak menggunakan bahasa terang seperti ini ya kita harus hati-hati, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Betul, bahaya.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Apalagi, apalagi pihak Kementerian Agama pun, Pak Yandri, sudah membuat Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, yang menyatakan tambahan itu harus diberikan kepada nomor porsi selanjutnya, Pak Dirjen ya?. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Agama, betul, tahun 2021. Begitu, Pak Ketua.

Jadi Menteri Agama telah membuat peraturan, bahwa tambahan itu. Saya tidak tahu nanti perdebatannya, apakah PMA Nomor 13 Tahun 2021 ini bertentangan atau tidak dengan undang-undang?, yang tadi dibacakan oleh Pak Marwan. Ini harus dikaji oleh kita. Bisa saja, sementara ini yang berlaku

adalah PMA Nomor 13, karena turunan dari Undang-Undang Tahun 2019 baru berlaku 5 tahun kemudian, misalnya. Saya kira ini kita juga harus hati-hati *gituloh*, membuat kebijakan ini, karena saya khawatir ini bisa menimbulkan berbagai hal yang sifatnya problematis secara hukum.

Bagi saya, saya sepakat saja dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, ya, uang 288 miliar plus kalau mau ditambah yang salah hitung 232 miliar, itu bukan uang yang sedikit. Itu uang yang cukup besar *gitu*. Kalau DPR atau Komisi VIII menyetujui tambahan tersebut, sementara BPKH nya sendiri seperti *ogah-ogahan* untuk apa namanya?, menyampaikan bahwa nilai keuntungan, apa, nilai manfaatnya ini sudah dikasih alarm duluan, nah menurut saya ini bahaya buat kita. Jadi saya tentu menginginkan, ya, langkah yang paling tepat buat kita, *ya* tentu harus diangkat ke dalam rapat dengan Menteri Agama langsung, karena ini keputusannya tidak bisa Pak, tidak bisa di sini, menurut saya, *ya*.

Jadi kalau kesepakatan kita misalnya sekarang ini, bahwa kita serahkan kepada, kalau di dalam PMA Nomor 13 itu jelas prioritas lansia dan pendampingnya. Bahasanya kan di situ itu begitu tambahannya itu. Atau yang kedua nomor porsi selanjutnya, PMA yang dibikin oleh Kementerian Agama begitu, dan atas dasar itulah, maka Kementerian Agama membuat usulan kepada kita, sebesar apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini dengan 8% tetap diserahkan kepada haji khusus.

Saya tentu ingin apa namanya?, mengingatkan kita semua. Saya tidak ingin beropini, tapi *ya*, baik BPKH telah memberikan *warning* kepada kita bahwa dengan kata lain dia, walaupun disetujui tambahan tersebut harus tertera di dalam Keppres. Pertanyaannya, mungkin tidak kita, Keppres kita buat dalam waktu dekat ini? *gitu*. Kalau tidak mungkin, justeru itu, kalau tidak mungkin, apakah kemudian, Pak Dirjen, *ya*, kita katakanlah serahkan kepada pembicaraan lebih lanjut, diserahkan kepada, akhirnya kalau Keppres-nya tidak keluar, tidak bisa dieksekusi juga sama Bapak ini. Bapak, Pak Dirjen nanti, Kang Dirjen bikin eksekusi hari ini kita tetapkan *ya*, misalnya, atau besok kita tetapkan, tapi kan tidak bisa langsung dieksekusi, Pak, karena BPKH nya minta supaya ada Keppres baru. Waduh, saya bilang kalau Keppres baru, kemarin saja *ngurus* Keppres bisa satu bulan lebih, apakah mungkin?.

02.28.20

Dan saya kembalikan kepada Pemerintah, maksudnya kepada Kementerian Agama, mungkin tidak membuat Keppres baru terkait dengan tambahan tersebut, dan secepatnya, sehingga bisa di eksekusi secara cepat. Kalau tidak mungkin, *iya* Ketua, kita ambil misalnya *ya* sudah diserahkan kepada katakanlah haji khusus, pertanyaannya kemudian apakah Kementerian Agama mau mencapai PMA Nomor 13 atau tidak?.

Saya kira kita kembalikan saja kepada Pemerintah, *gitu* Ketua. Karena dasar mereka adalah PMA Nomor 13 ini, *gitu*.

Saya kira itu catatan kritis saya.
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih banyak, Pak Ketua.

Saya kira kan hari ini ada 2 poin menurut saya yang terpenting. Tadi sudah ada penjelasan dari Dirjen PHU, terkait masalah kuota 8.000 itu. Nah selanjutnya ketegasan dari BPKH, apakah bisa mensubsidi dari nilai manfaat yang ada, tanpa menimbulkan kekhawatiran untuk keberlanjutan jama'ah haji berikutnya, gitu kan.

Saya hanya ingin mempertegas yang disampaikan Pak Ace tadi, bahwa kalau kita mengaju ke PMA ini tegas banget, bahwa pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan bagi jama'ah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsinya.

Kemudian kedua, jama'ah haji reguler, lansia, dan pedampingnya. Jadi sangat tegas disitu Pak. Jadi kalau Kementerian Agama melalui Dirjen PHU yakin semakin-yakinnya, bahwa 8.000 itu semua bisa terserap melalui haji reguler, kemudian BPKH juga mampu mensubsidi dari nilai manfaat, saya kira tidak ada masalah.

Yang soal ini kalau yang 8.000 ini tidak bisa terserap, dengan limit waktu yang sangat singkat, terus apa langkah berikutnya?. Kemudian BPKH tidak pernah tegas, apakah mampu mensubsidi kurang lebih 313 miliar?. Saya kira itu yang penting mungkin mendapat jawaban teman-teman pada kesempatan ini.

Selanjutnya saya persilakan kepada, tidak lagi ya, cukup ya, Dirjen PHU untuk merespon pertanyaan teman-teman.

02.31.05

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan;
Para Anggota yang kami hormati.

Tentu ada beberapa dan banyak catatan yang telah disampaikan terhadap.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Pak Dirjen, saya perpanjang lagi ya.
30 menit.

**(WAKTU RAPAT SETUJU DIPERPANJANG 30 MENIT)
(KETUK PALU 1 KALI)**

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Terima kasih atas masukan, kritikan, yang telah disampaikan oleh para Pimpinan dan Anggota, juga beberapa pertanyaan. Kami ingin menyampaikan, merespon beberapa diantaranya.

Pertama, mengenai data Pak, mengenai data yang akan, yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang kemarin kuota. Jadi kuota awal yang diberikan kepada jama'ah kita, yang belum optimal sampai bahkan pada hari Senin. Jadi kita sudah melakukan perpanjangan. Tapi kemudian kita di dalam sejak awal sudah menentukan kuota berikutnya itu dalam bentuk cadangan.

Jadi ingin saya sampaikan, bahwa kemarin itu ada anomali, Pak Pimpinan, jadi yang berhak masuk berangkat itu banyak, lebih dari 20.000 orang tidak mengkonfirmasi atau tidak mendaftar, tidak melunasi. Tetapi pada saat yang sama, untuk cadangan yang urutan berikutnya ikut melunasi. Jadi ini data yang ada di kami. Dan bahkan begitu rapat dengan DPR, untuk dengan cadangan pun itu belum sama sekali terpenuhi Pak.

Nah jadi kemarin yang sudah terpenuhi yang disampaikan oleh Pak menteri itu adalah kuota nasional, memang sudah melebihi Pak, jadi kuota nasionalnya sudah melebihi. Meskipun demikian kami sampaikan bahwa di beberapa provinsi, khususnya di Sumatera Utara, DKI, dan Papua, itu masih kurang beberapa jumlah jama'ah, ada seratusan, ada 130. Ada juga yang kurang dari itu, seperti di Papua. Jadi *Insyaa Allooh* data yang disampaikan oleh Pak Menteri, pada waktu kemarin itu sudah termasuk cadangan.

Yang kedua, kami juga mencermati peraturan yang ada, selain PMA 13 Tahun 2021.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Khusus cadangan dulu Pak.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Oh iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Sumatera Utara umpamanya, kenapa diberikan ke provinsi lain. Sumatera Utara juga antriannya panjang *Iho* Pak, kekurangan juga, siap juga

berangkat. Nah kalau itu kebijakannya?, kenapa kebijakannya tiba-tiba dibagi ke provinsi lain.

Kalau persoalan di sana lebih panjang itukan memang konsekuensi, konsekuensi dari keputusan kita mengenai proporsi per penduduk. Kenapa tidak diberikan kesempatan, kalau kebijakannya cadangan?. Cadangannya Sumatera Utara kan banyak juga, termasuk saya Pak. Nah itu tidak tepat juga. Lanjut.

Tentang itu belum setuju kita, walaupun sudah diambil kebijakannya.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Terima kasih, Pak Ketua, Pimpinan.

02.34.20

Bahwa memang itu simulasi Pak, untuk yang 8.000 diberikan. Karena kemarin, kemarin, eh *sorry*, yang cadangan, kekurangan.

Jadi begini, sudah kita berikan perluasan cadangan per provinsi. Tetapi ada 3 provinsi yang belum terpenuhi cadangannya sampai kemarin. Karena kemarin sudah ditutup tanggal 19 itu, maka kemudian yang tahap berikutnya yang disebut cadangan itu bisa berhak menjadi jama'ah *gitu ya*. Setelah diputuskan ternyata masih kurang, kira-kira begitu.

Nah sekarang kira-kira kalau misalnya ada tambahan lagi 8.000 apakah yang kemarin dengan cadangannya itu masih kurang, seperti DKI dan Sumatera Utara akan ditambah, itu simulasinya seperti tadi. Tapi nanti saya kira itu bisa dibicarakan.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Saya dikit tambahin.

Izin, Pimpinan.

Saya pikir kebijakan tentang sisa kuota yang tidak terpakai dialihkan ke provinsi lain itu, rasa-rasanya kurang, kurang tepat Pak. Karena apa?, provinsi-provinsi yang bersangkutan itu, memerlukan kuota itu ya, seluruh provinsi saya pikir memerlukan untuk berangkat.

Jadi kalau seumpamanya didengar sama provinsi yang dipindahkan kuotanya, itu mungkin agak marah masyarakatnya, "kami perlu di sini", gitu loh. Itu saya menambahkan apa yang disampaikan Bang Marwan tadi, *gitu loh*.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Terus nanti ada kuota tambahan, Bapak kasih lagi ke Sumatera Utara. Yang sudah dikasih ke orang lain itu bagaimana, mau ditarik? Ada kuota Sumatera Utara tidak terpakai, Bapak kasih ke provinsi lain. Terus ini ada

tambahan 8.000, Bapak kasih lagi ke Sumatera Utara? Bolak-balik, bagaimana itu cara berpikirnya?.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Betul, Pak Ketua.

Jadi sebetulnya kita mencoba psikologis dari jama'ah, *gitu ya*. Jadi kita simulasi terus, mana provinsi yang akhirnya dengan cadangannya bisa memenuhi, mana yang tidak. Nah sebetulnya di dalam aturan kita, bahwa kalau tidak terpenuhi, maka kemudian kekosongan itu bisa diisi oleh jama'ah yang satu embarkasi.

Cuma uniknya, Sumatera Utara itu cuma satu Pak, jadi kalau misalnya DKI Jakarta ada dari Lampung, ada dari Banten, bahkan ada dari Jawa Barat. Tapi kemudian, untuk Jawa Timur juga sama, ada dari provinsi. Yang Sumatera Utara, itu satu. Sebenarnya Sumatera Barat ada dari Bengkulu dan lain-lain. Sumatera Utara itu satu, tidak ada kawannya Pak. Seperti Aceh, nah ini bentuk simulasi, ada provinsi-provinsi yang jumlahnya agak banyak, nah ini kita simulasikan saja. Tetapi kalau itu saya kira simulasi itu bisa dikompromikan nanti Pak. Nah ini gambaran saja.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Sepertinya bukan simulasi. Kan ini sudah kebijakan Pak, sudah Bapak berikan. Sementara inikan, karena saya tegas saja kepada jama'ah haji dari Sumatera Utara, saya tidak bisa membantu untuk merekomendasikan bapak-bapak dipercepat. Itu banyak jama'ah Sumatera Utara yang ingin dipercepat. Kalau 66 lebih dari situ ada, yang bolak-balik bertanya ke saya. Kenapa Bapak tidak memberikan kesempatan untuk mendaftar?, karena memang dia tidak diberikan kesempatan itu, karena porsinya masih panjang di belakang. *Nah* tiba-tiba ditutup, kan kira-kira begitu?, padahal masih banyak ini yang mau di belakang ini Sumatera Utara. Itu ada datanya di saya.

Tapi saya sampaikan, "tidak bisa, termasuk *emak* saya". *Emak* saya sudah 79 tahun dan tinggal tahun depan, tapi saya tidak mau Pak, untuk mempercepat itu, tidak pernah saya usulkan, karena menurut aturan tidak boleh. Kalau Bapak kasih ke orang lain mending *emak* saya berangkat, saya sudah *dicerca* oleh *emak* saya, "apa gunanya kau di Komisi VIII?, tidak bisa kau berangkatkan". Ini sudah hati yang bicara Pak.

Furoda kan besar sekali biayanya Pak, saya tidak punya uang untuk itu. Ini sudah hati Pak, menangis ini bicara seperti ini. Nah inikan kebijakan ini tidak adil seperti ini. Nah saya kalau, kenapa Bapak pindahkan ke provinsi lain?. Kalau untuk itu saya siap *emak* saya saya bayar. Nah inikan tidak adil seperti ini.

Jadi kebijakan-kebijakan ini, Bapak kembali lagi membuat jawaban-jawaban yang tidak tegas. Bapak sampaikan bahwa itu tadi tidak anomali, itu

anomali tidak diketahui siapa. Inilah yang membuat Bapak tidak mengenal siapa daftar tunggu di 2022. Masa Bapak tidak mengenali itu, ternyata itu 2020. Sekarang Bapak sebut, Menteri sampaikan di sini sudah selesai daftar tunggu. Sekarang ditanya Bapak sebut anomali tidak diketahui siapa?. Inikan jawaban-jawaban yang tidak benar seperti ini.

Bukan, Pak John, bahwa sudah mendaftar seluruhnya, per hari ini sudah masuk, kan itu jawabannya, sekarang masih ada tersisa. Jawaban Bapak, yang masuk mendaftar waktu kita rapat itu anomali. Inilah cara-cara Bapak membuat catatan itu, membuat kita ini rusak ini seperti ini. Bapak tidak tahu siapa yang mendaftar. Kalau seperti ini terus menerus, bahaya kita Pak. Konsekuensinya kan anggaran. Inikan *amburadul* seperti ini, bolak-balik.

Saya masih ingat, saya tanyakan lagi itu, apakah lunas tunda ini sudah benar datanya? Sudah benar? 2022, 2020, sudah benar ini?, sudah benar. Rapat kemudian ternyata tidak ada 2022. Anggarannya ini miliaran pak, ratusan. Nah sekarang jawabannya begitu lagi, kan luar biasa seperti ini.

Jadi ini semua, bagi kami tidak masuk akal ini cara-cara seperti ini, Pak Dirjen, menyakitkan juga. Nah coba seperti apa lagi, silakan.

02.41.00

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Baik, nanti kita komunikasi dengan tim kami dari Sumatera Utara.
Mudah-mudahan, apa namanya, untuk pemenuhan.
Jadi intinya kita mencoba ingin memenuhi.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Pak Dirjen, maaf, ini bukan hanya Sumatera Utara, Pak Dirjen. Kita bicara secara Indonesia, gitu ya.

Jadi kalau seumpamanya Sumatera Barat juga teriak, nanti Pak Yandri, Banten juga teriak, gitu kan. Jadi kita bicara, artinya kalau sisa kuota yang tidak terpakai diberikan kepada provinsi lain itu saya pikir, janganlah. Walaupun Bapak menyampaikan hari ini hanya itu hanya suatu simulasi, gitu kan ya, tetapi itu menyakiti dari pada calon jama'ah haji di provinsi-provinsi yang Bapak pindahkan kuotanya itu Pak. Itu intinya begitu.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Baik, untuk yang lain, tidak Pak John ya, jadi memang kemarin itu kalau di dalam aturan yang ada, didorong pada jama'ah yang berasal dari satu embarkasi, jadi itu saja. Memang ini yang kami diskusikan juga, ini bagaimana kira-kira untuk mencari solusi dengan Sumatera Utara, karena dari Sumatera Utara itu di embarkasi tidak ada dari provinsi yang lain. Jadi itu nanti kita coba rumuskan lagi, Pak Marwan ya.

Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, nanti PMA 13, betul disampaikan Pak Ace, memang patokan kami masih ke situ Pak. Jadi tahun 2021 sudah ada Peraturan Menteri Agama. Dan dalam proses pelunasan maupun juga untuk apa namanya, penetapan dari jama'ah berikutnya, itu sudah diatur di sana. Jadi kami dari PHU mencoba membuat formula berdasarkan aturan yang ada di dalam PMA tersebut. Jadi *Insha Allooh* ini tidak menyalahi.

Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ketua, di dalam *e-hajj* itu sudah muncul Pak ya, 8.000 itu masuk. Dan formulanya ada 8% untuk haji khusus, gitu ya. Ini yang tanggal 19 kemarin sudah kami terima. Jadi kalau sebelumnya, itu informasi 8.000 tanpa ada pemisahan, tapi kemudian untuk yang berikutnya dari *e-hajj* itu sudah ada perubahan. Jadi pada saat Pak Menteri menyampaikan, memang *e-hajj*-nya 8.000 Pak, jadi masuk begitu saja.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Pak Dirjen, saya mau mencoba ya, apa namanya, membandingkan antara pendapat. Kalau penjelasannya Pak Dirjen jelas, bahwa formulanya adalah reguler sebanyak 12%, dan 8% dari 8.000 ya, kemudian 8% untuk haji khusus. Problem utamanya sekali lagi bahwa BPKH ya, mengatakan bahwa "oke, tapi harus dilegalisasi oleh Keppres baru", gitu.

Pertanyaan saya kepada Pak Dirjen, mungkin tidak dalam waktu yang sangat cepat, sementara haji sudah berlangsung, kita punya Keppres baru terkait dengan penambahan biaya haji tersebut?.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi kami memang dalam posisi berusaha untuk mewujudkan itu Pak. Jadi kita akan berusaha, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait apabila dengan DPR kita mendapatkan kesepakatan, semangat yang sama untuk dapat menyerap yang 8.000 dan harus mensyaratkan beberapa aturan, iya memang kita sedang perjuangkan ke situ, Pak Ace.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Izin, Pimpinan.

02.45.31

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Iya silakan, Pak Yandri.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Saya kira kita hampir tidak punya waktu sebenarnya kalau ingin berdebat hal-hal yang menurut saya tidak rumit Pak. Yang saya katakan tadi, prinsipnya kan 8.000 ini terpakai. Supaya ada *trust* juga dari Saudi, kan gitu kan, Pak Dirjen, dengan harapan kita tahun depan ada tambahan.

Tapi di sisi lain juga kita tidak mau *ngasih* beban terlampau berat ke BPKH, karena itu kita berarti *mengibuli* diri sendiri sebenarnya, karena sebenarnya BPKH kan berat untuk setiap ada tambahan dibebankan ke BPKH, *kan* itu. Kita kan kadang-kadang ambil enakanya saja.

Maka saya bilang tadi mungkin, kalau Pak Ace bilang tadi kalau setingkat RDP ini tidak bisa kita ambil, Raker itu undang-undang *lho* Pak, Rapat Kerja itu keputusan itu mengikat *lho* menurut Undang-Undang MD3 kita ya. Jadi kalau misalkan tadi yang saya bilang, "*oke* kita ambil", tapi dengan skema yang saya katakan tonggak sejarah bagi kita untuk menghadapi ke depan itu, iya mungkin akan lebih baik, Pak Dirjen, sehingga tidak membebani BPKH yang berkelanjutan, sama kita menjaga *trust* dari Saudi, gitu loh.

Nah mungkin usul saya, kalau misalkan ada rekomendasi RDP hari ini, tapi kita dengar dulu BPKH, BPKH ini sanggupnya berapa?, *gitukan*. Kalau kelihatannya sanggup sekian ribu, *ya* besok kita bawa ke Raker. Nah Raker itu kesimpulannya bisa mengikat, gitu loh.

Begitu, Pak Dirjen.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Izin, Ketua, sedikit.

Ini kalau, kalau seumpamanya, bukan *mengandai-andai* *ya*, tapi disampaikan oleh Pimpinan tadi, Pak Ace, bahwa penambahan 8.000 inikan juga perlu SK Presiden, *ya*. Pengalaman ini terhadap putusan panja yang lalu, putusan presiden itu sampai sebulan, dua bulan, bulanan *ya*. Sekarang kita sudah di tanggal 21, *ya* tanggal 21, tanggal 23 adalah pertama masuk kloter pertama ke asrama haji, ke embarkasi haji, tanggal 24 sudah berangkat.

Nah kalau seumpamanya, *iya* walaupun misalnya BPKH belum memberikan suatu ketegasan, apakah permintaan dari Pak Dirjen dikabulkan oleh BPKH, kalau seumpamanya, artinya katakanlah BPKH setuju, begitukan *ya*, kira-kira berapa lama Pemerintah menyanggupi SK Presiden itu keluar?, itu dulu yang penting *ya*. Sebab jangan sampai nanti kita sudah setuju. Sebab kita harus gerak cepat, Pak, harus gerak cepat. Kalau seumpamanya memang tidak bisa dan harus kita, artinya adalah kuota 8.000 penambahan ini harus kita pakai pak, jangan sampai tidak terpakai, begitu *lho*. Nah kalau seumpamanya bisa 2 hari atau 3 hari, kita memberikan ruang juga kepada penyelenggara haji khusus, supaya bisa juga mencari calon-calon jama'ahnya *gitu loh*. Dan tentu landasan hukumnya juga kita harus siapkan, dan ini memerlukan waktu. *Ya* itu tambahan dari saya mungkin Pak pertanyaannya.

Terima kasih.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

Pimpinan, Pak Ketua.

Kita ini *nggak* bisa sebetulnya bicara kapan Keppres keluar?, itu bukan otoritasnya Pak Ketua, bukan otoritas saya, bukan otoritas Pak Dirjen.

Tapi, Ibu-Bapak sekalian, kalau masalahnya itu kita coba ingat tahun lalu, tahun lalu 31 Mei kita rapat di tempat ini untuk penambahan 1,5 triliun. Itu 31 Mei. Dua hari kemudian, tanggal 2 Juni, Keppres keluar. Artinya tergantung teman-teman di Kementerian Agama bagaimana melakukan ikhtiar sekuat-kuatnya, agar cerita sukses tahun lalu dua hari Keppres keluar itu bisa diulang lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Terima kasih, Pak Luqman.

Cukup?.

02.49.55

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Satu lagi boleh?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Boleh.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini mitra, para mitra saya ini, urusan 8.000 jama'ah tambahan, mestinya kan sudah *clear*. Yang belum *clear* inikan masalah pendanaan. Ini saya mohon maaf ini sama BPKH, saya mau tanya ini, kan punya apa *fresh money* tidak untuk penambahan ini?, Ini jangan-jangan duitnya *fresh money*-nya pun *tak* ada mungkin ini. Jadi kita ini harus transparan, kalau sempat, ini mohon maaf *ya*, Pak Pimpinan BPKH, ini terlontar keluar hal-hal seperti ini gara-gara 8.000 *tak* berangkat, orang langsung menyalahkan BPKH, menganggap memang tidak ada uangnya BPKH. Bukan uangnya yang tidak ada, *fresh money* Pak, *fresh money*. Jadi ini harus jelas betul-betul ini, Pak Ketua. Jadi tidak ada urusan, misalnya terlambat SK Presiden dan sebagainya, itu tidak ada lagi Pak. Sekarang masyarakat menunggu.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan BPKH ya.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Iya, baik, terima kasih Pak Ketua.

Pertama, mungkin kami ingin menanggapi secara umum apa yang disampaikan oleh *feedback* dari para Anggota Komisi VIII, yaitu yang pertama adalah, bahwa hingga saat ini kami terkait dengan terobosan dalam pengelolaan investasi untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal, saat ini kami BPKH sudah memiliki anak perusahaan di Jeddah, BPKH-LLC, seperti yang kami sempat sampaikan pada saat di beberapa kesempatan. *Insyah Allah* ini kedepannya bisa menjadikan sebagai suatu terobosan. Selain mendapatkan atau meningkatkan nilai manfaat, juga dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap harga yang ada di Arab Saudi. Itu yang pertama.

Yang kedua, setuju dengan Pak Wakil Ketua, Pak Marwan mengenai kenaikan target..., target pendaftar setoran awal. Saya rasa itu adalah salah satu yang menjadi kunci bagi kami yang akan dituangkan di dalam renstra kedepannya yang *Insyah Allah* akan diusulkan kembali dan disetujui oleh Komisi VIII, sebagai salah satu juga tambahan sebagai solusi terhadap kenaikan dana pengelolaan.

Yang ketiga, secara teknis Pak, seperti yang pernah kita diskusikan di kesempatan sebelumnya bahwa setiap kenaikan 5% BIPIH itu sebenarnya representasi sekitar 1 triliun Pak, tambahan untuk menjaga *sustainability* keuangan haji. Jadi kalau misalnya, kedepannya jika diputuskan di dalam rapat, bahwa tahun depan akan ada kenaikan setoran awal, juga dengan kenaikan BIPIH, persentase BIPIH, misalnya sekarang kan tadinya 55 *versus* 45 ya Pak ya, tapi ternyata gara-gara ada tambahan tadi sehingga apa, lunas tunda, sehingga turun menjadi 51%. Kalau itu dikembalikan ke 55% persentasenya, kemudian ada kenaikan setoran awal, *Insyah Allah* apa yang kami sampaikan di dalam persentase itu akan menjadi lebih *sustain*.

Jadi itu yang kata kuncinya. Artinya, kalau tadi pertanyaan dari Pak Ace, kalau ada kenaikan atau tambahan setoran lagi apa, tambahan kuota lagi ke depan, misalnya tahun depan ada 20 ribu lagi atau berapapun itu, itu tinggal kita konversi saja Pak berapa kenaikan BIPIH yang harus dibayar, gitu, persentasenya berapa. Karena *rule of thumb*-nya 5% itu *versus* 1 triliun. Jadi nanti kalau berapapun yang harus diambil dari cadangan nilai manfaat itu, itu tinggal dimasukkan saja ke dalam formulasi BIPIH nya. Saya rasa itu

Pak jawabannya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih.

Kalau bicara *passion*, mohon maaf Pak Husni, seperti yang kami sampaikan tadi, kita punya *cash* 55 triliun pak, dalam bentuk *time deposit* yang *anytime* bisa dicairkan. Jadi rasanya sih tidak ada masalah kalau mengenai dana Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Yang penting BSI tidak *ngadat*.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Iya, terima kasih pak.

Setelah ada transfer seluruhnya yang tersisa yang tadi kami sampaikan, apa, sampai dengan akhir Mei ya?, iya sampai akhir Mei .

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Cukup ya.
Kita sudah bisa masuk ke kesimpulan?
Masih ada?.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Ketua, tadi yang masalah makan 3 kali itu bagaimana/, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tadi belum dijelaskan Pak ya?
Silakan.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Baik, terima kasih.

Jadi, pertama ingin saya sampaikan bahwa pada saat perumusan dan hasil keputusan dengan DPR, bahwa kita makan 2 kali. Dan waktu itu ada diskusi kemungkinan-kemungkinan untuk bisa meningkatkan layanan pada jama'ah dengan tambahan *snack* atau untuk pagi dan lain sebagainya. *Nah* kemudian dalam perkembangannya diputuskan hanya 2 kali. Tetapi dalam

perjalanannya kami belajar juga dari apa yang terjadi di masa lalu, ternyata dulu itu makan 2 kali, tetapi selalu ada tambahan *snack*, gitu ya, makan roti, susu, ataupun jus dan lain sebagainya.

Dan dalam berjalannya tim kami berkomunikasi dengan pihak dapur, kemudian meminta kemungkinan bisa ditambah hal tersebut, gitu ya, untuk disesuaikan dengan apa namanya, respons jama'ah yang memang kebanyakan walaupun pagi itu jangan roti, tetapi ada nasi. Dari situlah kemudian kami berdasarkan hitungan yang ada, mencoba melakukan efisiensi di berbagai aspek, dan ternyata dengan proses yang panjang sekali, saya harus menyampaikan panjang sekali, bisa ditekan, tetapi dengan komitmen agar layanan tetap bisa terjaga. Jadi kira-kira seperti itu Pak.

F-GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Pak Ketua, Pak Dirjen mengatakan 'kemungkinan'.

Tapi karena kita sudah menyampaikan ke jama'ah, saya rasa bahasanya bukan 'kemungkinan', tapi kepastian Pak.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Jadi maksud saya "kemungkinan" waktu proses kami untuk mencari skema agar ada sarapan yang bisa didapatkan oleh masyarakat, yang tadinya itu roti memungkinkan, tapi kemudian kita bernegosiasi dengan dapur akhirnya *alhamdulillah*, bisa ada nasi, meskipun ada konsekuensi penambahan rupiah, penambahan harga. Kemudian kita juga bernegosiasi untuk bisa menekan, dan *alhamdulillah* saat ini kemungkinan ada sarapan itu bisa diwujudkan dalam bentuk nasi, nasinya..ya pasti, Insya Allah.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tapi itu nanti jadi *problem* Pak, bahwa menyalahi keputusan. Bapak dapat anggaran dari mana?, kan itu sudah kita putuskan kemarin dua kali makan, terus dari mana itu?.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Waktu itu ada *klausul*, bahwa kita bisa kalau ada efisiensi dan ada kebutuhan yang lain dalam rangka peningkatan layanan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Efisiensi itu nanti Pak. Namanya efisiensi itu, Pak Dirjen, nanti. Setelah haji, baru efisiensi. Kalau sekarang Bapak ada efisiensi, ada apa?.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Kita bisa mendapatkan sesuatu di bawah pagu untuk bisa meningkatkan layanan buat jama'ah dan diantaranya makan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan. Anggarannya dari mana peningkatan layanan itu?, anggarannya kan sudah disepakati di sini bahwa untuk makan itu 7,50, 17,50. Terus Bapak tambahi lagi ada sarapan, anggarannya dari mana?.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Jadi begini, Pak Ketua, memang untuk biaya, kita coba menerapkan semangat baru Pak, jadi bahwa untuk makan pun sama seperti hotel, itu bisa menekan harga.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan. Intinya ada efisiensi, kan begitu?.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Iya...

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Efisiensi itu nanti setelah perjalanan haji. Kalau Bapak buat ada efisiensi sekarang, itu ada apa?, kenapa bisa efisiensi?. Berarti harga itu bisa setelah diputuskan masih bisa turun naik, *gitu*.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Sama seperti pagu kan, itu pagu Pak Ketua, Pimpinan.
Jadi itukan pagu ditetapkan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Pak Dirjen, kalau efisiensi itu nanti akan kita serahkan ke BPKH. Jangan pakai sekarang. Itu bisa jadi temuan *lho* nanti.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Jadi seperti tahun kemarin Pak, ada juga misalnya setelah dihitung harinya, ada sekian jumlah jama'ah yang tidak bisa mendapatkan makan, *kan* itu ditutup dengan anggaran yang tersisa.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Itu semua menjadi efisiensi yang akan Bapak laporkan di Komisi VIII dan kita setuju diserahkan ke BPKH, kembali lagi. Itu *problem* Pak nanti.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):**

Saya kira itu penjelasannya Pak.

**KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII
DPR RI/F-PAN):**

Ya artinya kalau kita mau tegas, efisiensi itu tidak hari ini?. Dan kalau *toh* ada efisiensi harus dikembalikan ke BPKH.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

Ketua.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Dilaporkan dulu di sini.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

Mohon izin, ikut *urun rembuk*.

**KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII
DPR RI/F-PAN):**

Silakan, Pak Luqman.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

Jadi begini, efisiensi berjalan itu boleh Pak.

Misalnya ada pagu anggaran 1 triliun, lalu dilelang kan itu modelnya. Ketemu penyedia jasa di bawah 1 triliun.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Oh ini tidak bisa, Pak Luqman.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

Sebentar.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak bisa disini.

F-PKB (LUQMAN HAKIM):

Nggak sebentar, saya bicara dulu.
Itu selama tidak keluar dari ibaratnya MAK-nya, itu bisa Pak.
Terima kasih.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak bisa.
Jadi harus dilaporkan, efisiensi itu penyelenggara itu dilaporkan di Komisi VIII. Nanti setelah itu ada yang harus dibayar, kita setuju dibayarkan ke utang-utang. Sisanya diserahkan ke BPKH.

Jadi sekarang tidak ada efisiensi Pak.

03.01.16

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Iya, saya kira begini, mungkin nanti dalam forum selanjutnya kita bahas itu, karena *toh* tidak pernah kita bahas kan?, masalah efisiensi itu kan tidak pernah kita bahas dan tidak menjadi agenda kita?, tidak menjadi agenda kita kan?. Nantilah kita lihat, begitu. Oke.

Saya perpanjang lagi waktu 10 menit ya, sebelum kita masuk ke kesimpulan.

**(WAKTU RAPAT SETUJU DIPERPANJANG 10 MENIT)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Kita setuju kita baca dulu kesimpulannya ya.

Tolong Setkom tampilkan di layar. Ini sudah bisa dilihat dari depan, dari kiri, dari kanan, semua, monitornya sudah canggih itu.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Ketua.

Kita *kan* mengingatkan, kita menjaga Menteri *Iho* kita. Jangan Bapak-bapak ceburkan Menteri Agama dengan kebijakan seperti ini. Gara-gara roti *Iho* Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kita hanya mengingatkan Pak, karena keputusan kita kemarin kan makan dua kali.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Mungkin roti siang dipindahkan ke pagi kali Pak.

Jadi roti siang dipindahkan ke pagi, jadi sarapan, itu tidak masalah itu Pak. Tetap anggaran kan makan siang, tapi yang sebagian dilemparkan ke pagi.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Oke, saya kira kan tidak menjadi agenda pembicaraan kita hari ini, itu.

Hari ini kita minta persetujuan saja ini dari Komisi VIII, terkait penambahan kuota 8.000 itu.

Saya baca ya.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan agenda Pembahasan dan Masukan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terkait Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 *milladiah*, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp288.312.382.288,42 sen, yang dialokasikan untuk anggaran tambahan kuota haji reguler tahun 1444 Hijriah/2023 *milladiah* sebanyak 7.360 jama'ah.

2. Komisi VIII DPR RI dan Dirjen PHU Kementerian Agama menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji bagi jama'ah kuota haji reguler tambahan dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat Kabupaten/kota, dan sebanyak 3 kali di tingkat KUAH dengan pertimbangan waktu pemberangkatan jama'ah yang semakin dekat.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia dan atau Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, diantaranya:

a. Mengatasi berbagai kendala terkait pengisian kuota haji reguler agar terserap secara penuh;

Saya kira bahasa ini sudah bagus.

Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga informasi yang disampaikan ke publik mengenai penyelenggaraan ibadah haji sama dan berdasarkan data yang akurat;

c. Mengalokasikan sisa kuota haji dan kuota haji tambahan untuk pendamping jama'ah haji lansia, gabungan *mahram*, dan jama'ah penyandang disabilitas beserta pendampingnya;

Jadi memang diatur dalam PMA 28, Pasal 28.

Saya kira itu Pak kesimpulannya.

Tapi begini, hari ini kita baru menyetujui anggaran ya, tambahan anggaran.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Ketua, saya *nggak* setuju dengan kesimpulan ini.

Pertama, forum ini tidak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Forum ini adalah untuk mendengarkan ya, ketersediaan ya, atau kemampuan dari BPKH untuk melihat, apakah bisa diambil dari nilai manfaat atau tidak?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Betul

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Karena itu bahasanya menurut saya, misalnya ya “Komisi VIII menerima penjelasan, misalnya ya....

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Oke, ya, ya silakan, silakan...

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Menerima penjelasan dari”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

BPKH ya.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Pertama tentu dari Dirjen PHU, tentang

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Usulan tambahan.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Penjelasan usulan tambahan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Bukan “usulan” lagi mungkin ya. “Tambahan” ya.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Ya.

“yang”, ya yang... misalnya tadi disebutkan 7 ribu sekian untuk...apa namanya?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

7.360 jama'ah.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Kemudian yang 8%nya untuk khusus. Misalnya ya ini, tergantung kesepakatan politik kita ini.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan “misalnya”, Pak Ace.

Kita kan sudah bertanya semua ini, kemampuan BPKH. Ini benar-benar BPKH bertanggungjawab. Jangan dibalik, jangan BPKH seperti suratnya disini tanggung jawab menjadi tanggung jawab DPR. Jangan dibalik Pak.

Kita minta bahwa poin pertama adalah tanggung jawab BPKH, bahwa dia bisa mengalokasikan anggaran talangan, bukan talangan, subsidi nilai manfaat dengan catatan bahwa keuangan haji dalam keadaan sehat dan *sustainable*, berkelanjutan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Nah itu, poinnya saya kira itu.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Ini tanggung jawab BPKH Pak.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Makanya saya kejar tadi, Pak Marwan. Sebenarnya BPKH *sih* tidak apa-apa, inikan rapat diantar kita, sebenarnya sehatnya berapa *gitu lho?*, supaya enak. Jadi jangan juga kita, dan saya bilang tadi kalau kita sudah memulai sekarang mau mengambil keputusan yang enak, ke depannya juga lebih enak, ada landasannya. Tapi kalau semua kita timpakan ke BPKH juga menurut saya tidak adil, setiap tambahan kita timpukin ke BPKH, jadi menurut saya tidak adil.

Makanya tadi saya minta dari 8.000 itu *ya* mungkin tidak semuanya 7.000 itu disubsidi oleh BPKH *gituloh, ya kan*. Dikeluarkan lagi, berapa. Itu untuk memulai sebenarnya, pesan saya untuk memulai. Bila mana nanti Saudi itu menambah tambahan itu banyak, Pak Dirjen, kalau tiba-tiba 30.000, bagaimana itu?. Walaupun setoran awal naik, dan juga ke makan itu, tidak boleh juga. Setoran awal naik itu *ya* berarti yang setoran awal itu harus lebih juga mendapatkan manfaat yang lebih banyak, karena dia setorkan uang lebih banyak. Kan itu kalau mau adil kan, gitu loh.

03.09.02.

Maka formatnya ini menurut saya, belum pada pemahami penjelasan permintaan anggaran itu. Kita belum dengar tadi dari BPKH itu normalnya berapa?. Maksud saya itu kita itu memulailah sekarang itu. Karena *ya* Pak Dirjen mungkin tidak lama jadi dirjen, saya juga tidak lama disini kan, tapi kita membuat landasan yang benar *gituloh*.

Bahwa *istitho'ah* itu penting kita tonjolkan, *istitho'ah lho*. Jadi yang berangkat haji itu yang mampu dari sisi anggaran juga mesti kita *tonjolkan*. Bahwa sekarang kita masih mensubsidi dengan nilai manfaat *iya*, tapi jangan beban itu menjadi beban sejarah, *gituloh*, maksud saya begitu *lho*. "Oh 2027 habis gara-gara Pak Kahfi ketua komisi waktu itu timpakan semua BPKH", kan tidak enak itu, maksud saya *gituloh*.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Inikan posisinya seolah-olah BPKH sudah siap ini membayar. Maka karena dia siap membayar, ini tanggung jawabnya. Harus dibuatkan poinnya Pak. Kami tidak mau, karena kami sudah ingatkan ini.

Tapi kalau Bapak berkenan tetap siap membayar *oke* kita buat. Tapi ini tanggung jawab BPKH, tanggung jawab penuh.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Saya kira begini, kalau menurut saya *sih* poin pentingnya hari ini, sesuai dengan keputusan raker kita kemarin dulu, bahwa hari ini kita akan meminta pendapat dari BPKH terkait usulan tambahan anggaran yang 8.000

itu. Nggak kita tidak bisa maksimal atau berapa, kita mau tahu sanggup tidak itu saja, dananya siap tidak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Saya pikir bukan hanya meminta pendapat Pak. Meminta kesanggupan dari BPKH.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Iya, betul, pendapat permintaan dari Dirjen PHU.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jangan diulang-ulang Pak.

Sudah dijawab sama Pak Husni tadi siap 50 triliun ada sekarang mau dcairkan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Jadi kalau begitu tinggal kita membuat *resume* yang narasinya disini bahwa.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

BPKH tanggung jawab

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

BPKH tanggung jawab, menyetujui begitu *kan?*

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan menyetujui.

Kita yang menyetujui Pak, bahwa BPKH bertanggungjawab, kita setuju bahwa ini tanggung jawab BPKH.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Coba dipermudah dulu bahasanya disitu ya.

Coba, "Komisi VIII menerima penjelasan dari Dirjen PHU"

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Sekarang “penjelasan” dulu, besok kita ketuk raker.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Putusannya kan besok Pak. Inikan baru penjelasan, kan.

Kan keputusannya harus raker dengan Kementerian Agama, baru bisa kita mengambil keputusan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Pak Ketua, izin.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Kenapa kemarin mengenai tambahan dari salah data itupun kita menyebutkan posisi kita tidak menyetujui. Kita serahkan saja, karena itu salah data, sama halnya dengan sekarang ini.

Karena ini data sudah merupakan data tambahan kuota, *oke* kita bicarakan di sini. Kami melihat BPKH tidak sehat kalau itu kita talangi semua subsidiya. Tapi kalau BPKH mengatakan itu siap, dan ada uangnya, dan di prediksi dari hitungan proyeksinya, keberlanjutannya aman *ya* silakan, Bapak sebutkan “kami sanggup”. Karena kami sudah mempertanyakan.

Nanti begini, Pak Dirjen, Pak Fadlul, jangan dianggap, dianggap Komisi VIII menghambat?. Kita semua sudah setuju 8.000 kita amankan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Ya harus habis

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Harus habis.

8.000 ini kalau membahayakan keuangan haji, kan ada yang siap, silakan saja. Kalau jawabannya kata, kata Dirjen keluarnya di *e-hajj* adalah reguler, itukan dari Bapak itu datangnya. Haji reguler 221.000 pun itu keluar pertama, semuanya reguler. Baru bapak buat surat, akhirnya akhirnya sekian persen khusus. Itu dari Bapak datangnya. Jangan disebutkan itu sudah keluar begitu, ini nanti kita *rubah*.

Lah kalau mengenai keputusan, dulu pun 2019, ada kuota tambahan 10.000 itu kita setuju, jalan saja, tidak nunggu-nunggu Keppres Pak, kalau itu. Jadi saya kira di situ. Jadi kami posisinya menganggap ini tidak sehat bagi

BPKH. Tapi kalau BPKH mengatakan “sehat”, kita buat di kesimpulan ini bahwa BPKH sanggup bertanggungjawab, *gitu*.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Saya kira bukan itu yang hari ini kita perlukan.

Yang kita perlukan kan penjelasan dari Dirjen PHU ya, terkait dengan tambahan 8.000 itu.

Kemudian yang kedua, *nah* ini kesiapan BPKH secara tegas menyatakan “siap”, sehingga saya kira tidak usah ada bahasa bertanggungjawab. Kalau dia sudah menyatakan “siap” saya kira sudah *include* didalamnya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Itu konsekuensi *loh*.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Iya konsekuensi.

Coba saya baca ya, supaya kita cermati bersama. Inikan cuma satu poin yang krusial ini memang. Komisi VIII poin 1 ini.

Silakan, Pak Ace, silakan.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Yang kedua, poin yang penting adalah, bahwa Komisi VIII apa namanya, tentang keberadaan BPKH itu sendiri terhadap ketersediaan anggaran untuk tambahan itu. Itu yang harus secara, yang poin keduanya itu yang secara *gamblang* harus secara eksplisit disebutkan di sini, soal kesiapan anggaran tersebut.

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Atau bagaimana?, rapat dulu BPKH atau bagaimana ini?.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin Pak.

Kalau memang.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tunggu dulu Pak.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Iya,oke.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Biar dinarasikan dulu.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jangan-jangan tidak setuju juga BPKH ini.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Meminta BPKH untuk”.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan “meminta”.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

“Menghitung dan mengkaji secara cermat terhadap nilai manfaat yang akan digunakan untuk tambahan kuota”, gitu loh.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Sebagaimana poin pertama.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Ya, sebagaimana poin pertama, angkanya.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Jadi kalau dia salah hitung, dia yang bertanggungjawab.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Untuk keberlangsungan sehatnya dana haji, istilahnya begitulah pokoknya, di masa-masa yang akan datang.

Jadi bukan hanya kita bicara sekarang, tapi ke depan itu bagaimana.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“Ketersediaan nilai manfaat yang dipergunakan untuk”.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Tapi kalau menurut BPKH aman, kuat, *ya* ditulis itu pendapat BPKH, bukan pendapat kita, kan *gitu* maksudnya *gituloh*. *Ya kan?*,

Nanti tiba-tiba kayak *first travel loh*, haji tidak berangkat, “oh tahun 2021 dulu katanya Anggota Komisi itu”.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Dan lagi tambahan, *ya*, pengelola BPKH, pengelola keuangan haji harus optimis, jangan terpengaruh sama ini. Harus, harus optimis.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“Untuk memenuhi kebutuhan tambahan reguler sebagaimana poin pertama”. *Iya kan?*

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin pertama.

Poin kesatu.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Iya, kecuali kalau sekarang BPKH sudah bisa memberikan jawaban *gituloh* rasionalnya berapa?, atau bagaimana?. Atau sangat siap “*ya saya nggak* pernah minta diperpanjang”. Sangat siap, tapi kan siapnya di situ, bukan di kita kan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Kalau mereka siap *ngapain* lagi kita suruh...

Untuk memenuhi kebutuhan tambahan reguler sebagaimana poin pertama

Coba kita mau dengar, supaya kita selesai ini.
Silakan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

...hitungannya sudah ada disini kok

**KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
(FADLUL IMANSYAH):**

Izin, Pak Ketua.

Mungkin kalau boleh kami minta waktu, Badan Pelaksana untuk diskusi sebentar untuk memberikan masukan terhadap kesimpulan.

**KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII
DPR RI/F-PAN):**

Saya sudah *Ashar*, yang belum *Ashar*, silakan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Skors 10 menit. Saya harus keluar ini.

**KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII
DPR RI/F-PAN):**

Kita skors 15 menit ya.

**(RAPAT DI SKORS PUKUL 17.25 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

(SKORS DI CABUT PUKUL 18.06 WIB)

Mana BPKH, Pak Fadlul?.

Tolong Setkom munculkan kesimpulannya.

Jadi poin 1 kan sudah disetujui tadi ya.

Nah poin ke 2:

“Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat keser..., ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin ke 1”

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Kita tunggu dulu BPKH nya ini.

Siapa tahu pas skors tadikan mereka menghitung, *gituloh*.

Kalau sanggup bilang sanggup atau belum?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Iyakan?.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Iya, bukan hanya menghitung, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Menyetujui, bukan menyetujui. Apa ya, menya....silakan Pak Fadlul bahasanya, “menyatakan kesanggupan dan bertanggungjawab”? Ini tersangka terus BPKH ini.

03.19.30

Sudah ada *tuh* kesimpulan Pak. Poin pertama kan sudah tadi sudah selesai kan, kita masuk ke poin ke 2.

“Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin ke 1”.

Jadi Komisi VIII memberi kesempatan ke BPKH untuk melakukan pengkajian dan menghitung secara cermat.

Tadi kita kasih waktu 15 menit, apakah itu sudah cukup, atau harus lagi kita sampai besok.

Silakan Pak.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin Pak.

Jadi berdasarkan diskusi kami, Badan Pelaksana ada tiga hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama terkait dengan kuota tambahan. Pertama, seperti yang kami sampaikan di dalam halaman, slide, halaman 11 pak, tentang hal-hal yang memerlukan keputusan DPR dan Pemerintah.

Di poin pertama itu kami mengambil hasil kesimpulan RDP tanggal 15 Februari, nomor 9 huruf i yang merekomendasikan kebijakan agar jika terdapat tambahan kuota dapat dialokasikan untuk jama'ah reguler dengan pembebanan biaya BPIH penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kalau kita harus mengambil nilai manfaat pak, berarti otomatis poin ini harus di *take off* dulu Pak, dianulir, atau di koreksi, atau di revisi. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya memang kita sepakat untuk mengambil nilai manfaat.

Yang kedua, setelah kami diskusikan dan kami simulasikan secara umum, bahwa, kalau memang harus mengambil nilai manfaat ya, itu mungkin kami mengusulkan sesuai dengan kajian yang saat ini masih kita lakukan terkait dengan *sustainability* keuangan haji, bahwa persentase BIPIH dan nilai manfaatnya itu adalah 60-40 untuk jama'ah haji yang tambahan kuota 8.000. Pertimbangannya adalah, pertama, 8.000 inikan menarik kuota dari yang tahun depan harusnya berangkat pak.

Jadi diasumsikan, sesuai dengan apa namanya, kesimpulan pada RDP sebelumnya, bahwa akan ada penyesuaian BIPIH di tahun-tahun yang akan datang. Jadi sesuai dengan kajian kami, bahwa, karena kemarin kan kita 55-45% pak ya, porsinya, 55-45, dengan asumsi kita tahun depan itu akan mengajukan 60-40, walaupun sekarang kita masih, akhirnya gara-gara ada tambahan yang data itu yang lunas tunda itu, jadi 51-49, jadi sehingga kami mengusulkannya jika memang harus mengambil nilai manfaat itu di porsi dari BIPIH dan nilai manfaatnya adalah 60-40, karena ini akan menjadi basis untuk keberangkatan haji di 2024.

Jadi tanpa kita harus mungkin berdebat lagi atau berdiskusi lebih lanjut lagi, terkait dengan BIPIH, BPIH, dan nilai manfaat tahun 2024, ini bisa menjadi basis untuk kita menetapkan sesuai dengan keputusan. Walaupun secara apa namanya, secara angka pak, memang angkanya dari 288

mungkin berkurang hanya sekitar 23 miliar, tidak terlalu signifikan pak. Tapi paling tidak bisa menjadi basis landasan untuk kebijakan kita di tahun ke depan, bahwa kita mengedepankan *sustainability* keuangan haji, dan yang berkeadilan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kami mohon yang, kalau memang harus dimasukkan di dalam nilai manfaat, itu juga dituangkan ke dalam Keppres, seperti yang tadi kami usulkan di awal. Termasuk didalamnya yang 233 Pak, yang di awal. Kan 233 tambah 300 *something* kan, nah itu juga mohon bisa masuk ke dalam, jadi bukan hanya yang tambahan Pak, tapi yang melalui itu juga mohon bisa dimasukkan ke dalam Keppres, untuk bisa kami jadikan basis sebagai transaksi untuk pembayaran ke PHU, *gitu*.

Jadi ini, kalau tiga hal ini disepakati, *Insyallah* kami pada prinsipnya siap untuk mengeksekusi sesuai dengan arahan Komisi VIII DPR dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Terima kasih.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Izin, Ketua, menanggapi.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan, Pak John.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Saya menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPKH, *gitu ya*. Menurut hemat saya secara pribadi, kalau ada perbedaan antara jama'ah haji yang kuota 221.000 dengan tambahan kuota 8.000, kalau menurut hemat saya itu tidak mungkin. Akan muncul kecemburuan nanti, ya, akan muncul kecemburuan. Kenapa *kok* ada perbedaan antara jumlah yang ditanggung oleh BPKH yang di subsidi oleh BPKH dengan antara kami?, maksudnya dalam tanda petik adalah kuota yang 8.000, dengan kuota yang 221.00. Itu pendapat saya.

Jadi ya saya hanya *menggalang* dan apa namanya, memberikan keoptimisan disinilah letaknya komisioner BPKH pengelola, dalam hal bekerja atau bagaimana, *gitukan ya*. Jangan khawatir, itukan *toh* ini bekerja terus, BPKH bekerja terus, nilai manfaat akan terus masuk *gitukan ya*, untuk, untuk apa namanya, dari tahun ke tahunnya. Jadi kalau ada perbedaan yang ini 40%?, ini 45%?, atau berapa persen?, itu akan memunculkan suatu, suatu perdebatan nanti diantara para jama'ah. Ini pendapat saya.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan, Pak Kyai.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini sekedar mengingatkan saja *ya* Pak *ya*. Bukan kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi ada *souldtimes* yang harus kita pikirkan, dari 8.000 itu paling tidak 50 kloter, 20 kloter, 20 kloter.

Tahun 2019 kita 5 kloter, itu ternyata harus adu argumen, di mana kita kedatangan?, di mana keberangkatan?. Sampai akhirnya kita dapatnya di Madinah. Itu setelah kita betul-betul beradu argumen habis-habisan. Bayangkan saja dengan 20 kloter tambahan, kita membutuhkan biaya tambahan, waktu tambahan, tenaga tambahan. Inipun harus menjadi pertimbangan juga bagi kita, seperti itu.

Nah yang kedua, sebenarnya sederhana saja kalau kita tidak ingin berdebat soal ini. Karena *preseden buruk* juga misalnya kita mengambil beberapa keputusan di tengah ini *preseden* yang tidak terlalu bagus. Pikiran saya sederhana saja, masa *sih* 8.000 ini tidak kita kasihkan kepada orang yang tidak perlu ambil dari nilai manfaat, misalnya. Seperti yang penting terserap. Karena kalau tahun depan tiba-tiba kita ditambah lagi dengan asumsi kita dapat 300.000, tetapi dengan pola yang terus berganti-ganti berubah seperti ini, maka kekhawatiran BPKH mungkin saja terjadi, karena kita terus apa namanya, memberikan subsidi yang menurut saya sudah mulai harus dikurangi kalimat kita soal perdebatan kita. Soal *istitho'ah* itu harus sudah mulai di, di apa, disosialisasikan kepada masyarakat.

Itu catatannya, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Ada tambahan?

Kalau saya selama tambahan kuota haji ini dalam konteks haji reguler, tentu seharusnya menyesuaikan dengan BPIH yang kemarin pak, yang tahap pertama itu. Karena tidak ada alasan yang signifikan menurut saya, kalau selama masih haji reguler terus ada perbedaan BPIH, eh BIPIH. Kecuali kalau dia menjadi haji khusus, itukan lain cerita itukan. Karena itu akan

menimbulkan ketidakadilan bagi sesama jama'ah di tahun yang sama, fasilitas yang sama, perlakuan yang sama, tapi pembayarannya berbeda, itukan menurut saya kurang adil, buat saya.

Nah untuk ke depannya, tahun-tahun ke depannya, barulah kita bicarakan lagi Pak. Saya kira memang kita semua sepakat bahwa mungkin ke depan nilai manfaat ini kalau perlu kita kurangi, tidak seperti sekarang lagi. Tapi jangan sekarang, kalau sekarang kan menimbulkan masalah di publik. Kalau di tahun yang sama, agak riskan pak menurut saya, *gitu ya pak ya*. Selama BPKH mampu, itu saja. Kalau memang Bapak tidak mampu *ya bilang, kita ambil keputusan lain, kan gitu kan?*

03.29.21

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin Pak.

Pada prinsipnya yang ingin kami kedepankan adalah *massage* kepada masyarakat dan publik, bahwa BPKH menjaga *sustainability* keuangan haji yang berkeadilan, itu saja intinya.

Jadi kalau bicara mengenai dananya seperti yang terpampang bahwa sebenarnya dananya untuk saat ini, *gitu ya, bahasanya ya seperti itu*. Tapi kalau misalnya nanti...

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tegas Pak *ngomong*.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Dananya tersedia untuk tahun ini.

Tapi mohon kalau boleh untuk mengedepankan misi kita sama-sama Pak, *sustainability* keuangan haji dan yang berprinsip kepada keadilan, mohon pertimbangkan kalau memang, tidak, apa, dipertimbangkan mengenai rasio BIPIH dan nilai manfaat tadi.

Itu saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Semangatnya kita setuju Pak, tapi tidak hari ini, tidak untuk haji tahun ini. Untuk tahun depan *oke*. Ya tapi kalau untuk tahun ini kalau saya kurang setuju. Karena publik sudah tahu, bahwa setoran hajinya 25, dia sudah tahu tambahannya juga berapa itu?. Kalau pendapat saya, *gitu*.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Sependapat, Ketua.

Karena Panja Haji sudah memutuskan berapa jumlah yang harus dibayar oleh jama'ah. Tidak mungkin kita membuat satu keputusan panja lagi tentang biaya yang 8.000, kan begitu.

Ya setidaknya-tidaknya apa yang kita putuskan pada hari ini tentang subsidi BPKH, sejauh itu sama dengan keputusan panja-panja sebelumnya, *ya kita oke, gituloh*, prinsipnya *oke*. Ketegasan inilah yang kita minta kepada BPKH.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Kalau saya tadi makanya *simple* saja, dari 8.000 itu, walaupun tadi Pak Dirjen bilang sudah ada kemungkinan tidak itu 8% itu ditambah?. Inikan kuota tambahan kan. Kalau undang-undang kan sebenarnya keputusan Menteri, kebijakan menteri atau persetujuan DPR. Karena kuota tambahan itu kan bukan kuota yang apa namanya, normal *gituloh*.

Jadi menurut saya kalau di undang-undang yang dibacakan Bang Marwan tadi diserahkan kepada keputusan menteri. Walaupun tadi kan Pak Dirjen masih melihat keputusan menteri yang lama kan?, artinya kalau melalui raker besok misalkan, raker besok memutuskan. Raker itu kan terikat menurut Undang-Undang MD3, tinggi itu, keputusan raker itu mengikat, artinya bisa lebih tinggi dari peraturan menteri sebenarnya.

Misalkan untuk menghemat atau untuk menjaga keberlangsungan dana BPKH itu kita mulai. Misalkan dari 8.000 itu bisa nggak 6.000 yang apa namanya, dinilai manfaat, 2.000 mandiri, gitu loh. Mandiri ini mungkin ada reguler yang memang sanggup, bayar penuh, iyakan. Kalau pun dia sudah daftar lama dihitung saja *virtual account*-nya berapa?, tinggal dikurangi itu saja. Tapi sisanya dia penuh saja. Atau haji khusus, kalau mau *ya* penuh saja *gituloh*. Maksud saya pesan ini penting, gitu loh.

Nanti kalau kita tahun depan dapat 30.000 atau 20.000 tambahan, sudah, polanya kita pakai. Kalau mau memulai, *gituloh*. Nah artinya keadilan masih tetap, yang reguler tadi tetap kita ada nilai manfaat yang kita lakukan, tapi kita sudah memulai, bisa tidak misalkan dari 8.000 itu 6.000 yang kita nilai manfaat, 2.000 kita mulai dengan mandiri, *gituloh*. Misalkan itu, itu untuk mengantisipasi kedepannya. Ini contoh konkritnya, kalau usul saya begitu sih.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Izin, Ketua.

Mohon maaf, Pak, Pak Wakil Ketua MPR, tidak bermaksud untuk berdebat, gitu loh ya.

Kalau saya *sih* lebih *condong* apa yang kita harus jalankan adalah berdasarkan keputusan panja. Keputusan panja kita tidak ada. Hanya dua, yaitu haji reguler dan haji khusus. Tidak ada haji mandiri. Saya orang hukum ya, jadi saya artinya agak konsekuen untuk di situ. Jadi kita hanya dua sekarang. Kalau memang artinya tidak mampu BPKH ya, kita dorong ke haji khusus, ya itulah yang haji mandiri.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Angkanya tadi kalau usul saya ya 6.000-2.000 kita memulai.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Ya kalau seumpamanya memang BPKH tidak sanggup, kita dorong ke haji khusus. Apakah 3.000?, apakah 4.000?, atau setengah-setengah?, atau berapa?, atau bahkan semua?.

Yang paling penting bagi saya adalah kuota tambahan ini harus dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai tidak ini. Kita butuh itu.

Terima kasih, Ketua.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Tambahan, Ketua.

Apalagi tadi, Kepala Badan bicara soal ini dimasukkan ke Keppres. Ini proses Panjang Pak, kita sudah ada pada posisi mau pemberangkatan. Jadi ini harus dipikirkan matang-matang. Proses birokrasi kita kan dari dulu memang kayak *gini* Pak, *lelet bin* sulit dimengerti. Nah jadi saya ingin menguatkan saja, perlu ada keberanian dari BPKH untuk mengatakan “ya” atau “tidak”. Kayak gitulah, satu.

Yang kedua, kita ada perlu keputusan yang kuat. Misalnya kalau “ya”, bagaimana presentasinya?, kalau “tidak”, bagaimana konsekuensinya?. Jangan menimpakan keputusan ini/keputusan politik di DPR, dan itu bahaya.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Tapi kalau kita berani juga melakukan keputusan politik untuk perbaikan juga BPKH siap. Kita bilang, kita bilang misalkan tadi, untuk menjaga sehatnya nilai manfaat, ya kita mulai dari tahun ini, khusus sekian, reguler sekian. Itu juga keputusan politik, BPKH saya kira lebih aman kalau begitu kan, *gituloh*.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kan begini, yang kita mau dengar dengan tegas dari BPKH ini, apakah dengan skema nilai manfaat sama dengan reguler tahap pertama dengan

yang 8.000 ini, apakah BPKH sanggup? ya kan. Termasuk menjaga keberlanjutan biaya pengelolaan haji itu. Kalau itu sanggup ya sudah, selesai, itu saja Pak. Kita kan *mutar-mutarnya* di situ sekarang.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Insya Allah sampai *sholat subuh* lah di sini.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kalau ndak ya...

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Pada prinsipnya kami akan melakukan apa yang akan diputuskan oleh keputusan rapat, itu pertama.

Tapi dengan catatan Pak bahwa ke depannya, mohon izin agar kita juga kalau bisa di dalam keputusan rapat itu, ada sinyal bahwa ke depan kita akan menaikkan porsi BIPIH dan nilai manfaat, yang pertama.

Yang kedua, kita kuatkan lagi mengenai kenaikan setoran awal seperti yang sudah disampaikan.

Atau yang ketiga, kita kuatkan lagi mengenai adanya kemungkinan cicilan setoran lunas.

Mungkin kalau itu bisa disepakati *Insya Allah* kami siap.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Itukan tinggal *draft*-nya Bapak yang Bapak dorong ke kami.

Kami tinggal menunggu *draft* itu. Kan sebenarnya dari kemarin-kemarin kan teman-teman mengusulkan itukan?, kenaikan setoran awal dari 25 menjadi 30. Itukan tinggal kita tunggu dari Bapak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Di rapat yang akan datang kita putuskan.

Sekarang yang kita minta ketegasan dari BPKH adalah *yes or No? gituloh*, berapa sanggupnya?. Ini kita terbuka ini, ini rapat kita terbuka. Kan masih terbuka kan, Pak Ketua?.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Tolong buka pintunya itu, terbuka tidak itu.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Oke Pak ya, setuju ya?, kita ketok ya untuk poin ini ya?.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Apa itu poinnya?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Ndak, poinnya bahwa BIPIH untuk haji reguler tambahan ini sama dengan BIPIH haji reguler tahap pertama, tidak ada perubahan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak perlu, itu tidak perlu Pak.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

55-45 Pak ya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak perlu ditambah, tidak perlu diketok, nggak perlu.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Otomatis menyesuaikan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak perlu.

Yang namanya haji reguler itu di dalam undang-undang itu keputusannya itu. Maka tidak perlu ada Keppres, mengikuti Keppres yang ada.

Jadi berbeda dengan Bapak yang minta harus ada Keppres, *nggak*. Kita ikut di Keppres itu, bahwa kita memberikan subsidi sebesar itu. BIPIH nya seperti itu, BPIH nya seperti itu, kalau reguler.

Pertanyaannya, kalau ini semuanya di subsidi, tahun ini uangnya ada?. Tetapi proyeksi ke depan, bila kuota tambahan masih ada itu akan menyulitkan BPKH. Kalau menyulitkan?, kalau tidak menyulitkan ya sudah putuskan saja, "bisa". Jangan dilempar ini tanggung jawab ke DPR. Yang

punya hitung-hitungan Bapak, Bapak yang mengatakan ini “bisa”. Kalau Bapak katakan “bisa”, kami setuju.

Jangan nanti dari kami memerintah Bapak mengeluarkan, itu jangan terbalik. Ini jangan dipersulit, tidak perlu *thowaf* kita ini, cukup hajinya saja *thowaf*.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Paham Pak ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kita nunggu dari Beliau.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jadi, saya lanjut dulu, Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan, silakan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Kalau dia berada di posisi regular, itu keputusannya mengikuti Keppres. Tapi kalau ini tidak masuk ke regular, Pak John bilang hanya ada dua jama'ah kita, regular dan khusus, maka kita geser ke khusus.

Untuk khusus kita pakai Pasal 9 poin kedua, “ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan Menteri”. Atur saja, buat saja, untuk pemanfaatan kuota tambahan ini untuk menyelamatkan kuota haji sekian ribu di *over* ke khusus, sudah, selesai. Tidak ada masalah *kok*, ada pasalnya di sini. Kalaupun tadi kekhawatiran Pak Ace sudah ada Permen, tapi kan sekarang ini lain lagi, 2023 ini beda lagi dengan yang kemarin. Ini, besok kita Raker keputusannya. Begitu Pak, jadi jangan dipersulit.

Kami ini menyetujui regular, semuanya *oke* tidak ada masalah, asalkan Bapak katakan uangnya tersedia dan Bapak bertanggungjawab. Jangan dibalik, ke kami tanggung jawabnya, karena yang mau dibayar oleh BPKH itu 550, karena ada salah data. Bukan hanya regular saja. Jangan timpakan ke kami Pak. *Lah* tapi kalau tidak bisa, kita sudah *oke* ini 8.000 kita pakai, kalau

tidak bisa kita masuk ke Pasal 9 poin 2 ini, kita geser ke kuota khusus. Karena ini bukan bagian dari kuota reguler 221.000, ini tambahan, menteri boleh mengatur untuk itu. Jadi *kok* dipersulit lagi, putar-putar kita ini.

Nah kalau Bapak mengatakan ada uangnya dan siap, nanti kita buat poinnya bahwa BPKH menyiapkan anggaran untuk subsidi bagi kuota tambahan, dan menjaga keselamatan keberlangsungan keuangan haji. Sudah itu saja poinnya. Iya kalau mau duduk ikut, boleh.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Pimpinan, jadi kalau saya jadi BPKH kan kalimatnya begini:

‘Setelah kami hitung’, iya kan, “tambahan 8.000 ini akan sangat mengganggu proses dana kemaslahatan, oleh karena itu kami milih poin kedua yang diusulkan Pak Marwan”

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Ya, ya...

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Kayak begitu, ini pasal dan seandainya

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Wah Pak Marwan ini baru kesimpulan dia

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Makanya kita dengar dulu dia.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Nggak, kalau, kalau, kalau mau, sebetulnya yang diinginkan oleh BPKH itu jelas *ya*, sebagaimana kesepakatan dalam rapat tanggal 15 Februari. Kalaupun ada itu, jangan dibebankan kepada nilai manfaat, BPIH nya, kan kira-kira begitu *pengennya* itu kemudian ditafsirkan kalau nggak.

Itukan sebetulnya tidak dibebankan kepada haji reguler, haji reguler pun juga diberikan tawaran. Tapi kan pelaksanaannya menurut saya sulit. Mengapa?, karena sekarang saja dengan komposisi 45-55 saja *gitu ya*, berat buat masyarakat, buat masyarakat yang reguler *ya*. Bisa saja *sih* sebetulnya dikasih tawaran kepada yang reguler, *oke*, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadlun gitu *ya*, bahwa keinginannya 60-40. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan itu?. Kenapa?, karena ini soal *constrain* waktu. *Nah* saya kira

syarat-syarat yang disampaikan oleh BPKH pun ini menyangkut dengan kesiapan waktu di mana pelaksanaan haji tambahan ini memerlukan, pertama tentu nanti perlu ada sosialisasi lagi, macam-macam tadi ya. Jadi tidak gampang, gitu loh.

Jadi artinya, menurut saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu pasti, apa, yang disampaikan oleh BPKH tadi oleh Pak Fadlun terakhir itu sebetulnya akan mempersulit jama'ah dan pelaksanaan teknisnya bagi Kementerian Agama, *gitu*. Saya kira itu ya.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

*Oke Pak ya saya kira.
Silakan, Pak Fadlun, terakhir.*

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin Pak, mungkin anggota kami ada yang ingin menyampaikan beberapa hal pendapat juga pak.

Mohon izin kalau jika diperkenankan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan saja Pak.

ANGGOTA BPKH:

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

Terima kasih, Pimpinan Komisi VIII;
Tentu dengan para yang terhormat para Anggota Komisi VIII.

03.44.10

Kami ingin sampaikan, Pak Ketua dan Wakil Ketua Komisi dan Bapak-bapak, Ibu Anggota Komisi VIII.

Dalam rangka menjaga tata kelola BPKH, memang kami terikat dengan Undang-Undang 34 Tahun 2014, di mana memang dalam proses penentuan pengeluaran yang dikeluarkan oleh BPKH Pasal 11 menyatakan besaran pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji itu ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR.

Jadi persetujuan setelah melakukan panja, kemarin kita telah menetapkan untuk 221 ribu jama'ah haji. Sehingga berdasarkan rapat dengar pendapat dan raker yang ditetapkan Pemerintah dengan DPR itu dibuat Keppres pak.

Nah preseden kita, kebetulan ada preseden hukum yang terjadi pada saat *masya'ir* dibentuk pada tahun lalu, terjadi peningkatan biaya, ada preseden hukum yang dibentuk dengan dibentuk juga Keppres, sehingga apabila kemudian, seperti tadi wacana disampaikan oleh Pimpinan Komisi apabila tidak ada keberadaan Keppres, maka kita berpotensi melanggar undang-undang Pasal 11 ini, sehingga kami tidak bisa secara tegas melanggar pasal undang-undang yang diatur, mengatur mengikat kita, Pasal 11 ini.

Oleh karena itu narasinya mungkin bukan “sanggup, tidak sanggup” Pak. Tentu BPKH secara keuangan sangat *liquid*, kita punya 42 triliun *cash*, tapi kemudian *governance*-nya kami tidak bisa melanggar undang-undang ini.

Oleh karena itu memang kami membutuhkan keputusan rapat ini pak untuk dapat dituliskan dalam bentuk notulensi, sehingga menjadi basis bagi Keppres. Karena apabila notulensi dan Keppres itu tidak keluar, maka kami melanggar Pasal 11 Undang-Undang 34.

Terima kasih Pak.

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Pak Ketua.

Kalau Keppres itu ada juga yang menjadi landasan kita, tahun 2019, ada kuota tambahan 10.000, dan itu kita setuju. Pada saat itu tidak ada beban yang lain, keuangan BPKH cukup. Inikan karena ada pertanggungangan yang kita warisi di 2020, sehingga ada jama'ah yang sudah lunas tunda harus kita *cover* semua tanpa, ini yang membuat bebannya semakin berat. Jadi sebetulnya kita bercermin dari keputusan 2019, itu tanpa Keppres. Keppres yang sudah diputuskan itu mengikuti, tambah 10.000.

Nah kami ini, tidak usah khawatir, pasti kami setuju. Tapi sekarang kenapa kita undang BPKH, ini hitung-hitungannya. Kalau kita paksakan Bapak-bapak, nanti kesimpulannya itukan “kami dipaksa oleh DPR”, kami tidak mau. Karena ini tambahan Pak. Kalau 221.000 itu kami paksa, kami putuskan, Bapak bayar, itu perintah, kami itu sudah teken.

Tapi ini kuota tambahan, kuota tambahan ini ada pasal lain yang memungkinkan untuk dibagi. Kalau memang keuangan BPKH berat, nyatakan. Sekarang uangnya ada, tapi kalau dikeluarkan itu bisa menyulitkan untuk mengatur keuangan ke depan, itukan ada poinnya. Kalau begitu kita minta Pemerintah pakai Pasal 9 ayat (2). Tapi kalau Bapak-bapak nyatakan ini “oke, tidak ada masalah”, sudah, kita buatkkkan saja. Kami mendengarkan bahwa BPKH punya ketersediaan anggaran untuk memberikan subsidi bagi tambahan kuota. Karena ini tambahan kuota Pak, pasalnya beda. Pasalnya ini Pasal 9, bukan pasal yang kemarin, pasal haji reguler. Itu saja.

Jadi kalau tidak ada masalah ya kami menyetujui bahwa Bapak-bapak menyatakan ada ketersediaan anggaran, itu saja.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.PT.):

Jadi kira-kira pesan para Anggota, Pimpinan ini, Pak Fadlul, bagaimana kita ini menjaga sehatnya BPKH, Pak. Peluangnya ada. Dan ini kemungkinan tahun depan itu ada juga kuota tambahan, bisa juga lebih besar kalau ini kita habiskan. Dan itukan peluang bagi kita. Sebenarnya orang daftar haji khusus itu bukan juga mereka karena *gagah-gagahan* banyak duit, karena tidak mau lama antri, iyakan, jadi tidak salah juga kalau kita kasih peluang ke mereka untuk berangkat haji dengan kuota tambahan, gitu loh tidak salah juga.

Dan saya bilang tadi, memulai sejarah itu penting, Pak. Tapi kalau kita terus jaga sesuatu yang tidak sehat ya ketemu penyakit diujung itu yang mengkhawatirkan nanti Pak. Maksud saya itu, kenapa tidak kita mulai itu. Karena ada juga di Pasal 9 itukan untuk pembukanya, gitu loh.

03.49.04

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tapi begini, Pak Yandri, izin, Pak Ketua.

Kalau seperti ini sikap BPKH, ini pasti sia-sia 8.000 ini. Nunggu Keppres, nunggu apa?. Pasti sia-sia, tidak akan bisa dipakai. Jangankan itu, yang normal saja, yang normal saja, reguler ini yang 221.000, sampai sekarang ini datanya masih bermasalah. Apalagi ditambah 8.000 Pak, nunggu Keppres lagi, sudah selesai hari raya.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Pak Marwan, mohon maaf Pak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Saya pikir begini, saya ikut *urun rembuk*.

Masih keingat sama kita, pada waktu haji 2022, di mana tiba-tiba Pemerintah mengajukan *masya'ir* naik, ya, dan dibutuhkan uang dalam jangka waktu 3 hari 1 setengah triliun. Demi, demi, demi artinya jama'ah haji berangkat, demi jamaa'ah haji berangkat, kita setuju itu. Tetapi sebelumnya apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, ada kesanggupan dari BPKH untuk itu. Apakah ada Keppres-nya?, Tidak ada, yang 1 setengah triliun?, Kalau seumpamanya saya yakin kalau memang itu diperlukan Pemerintah juga tidak mungkinlah menyia-nyiakan itu.

Rapat kita malam ini pak, rapat kita malam ini, ini betul-betul melihatkan keprofesionalan 2 lembaga ini, dalam hal Pemerintah dalam

melaksanakan ibadah hajinya, di sisi lain BPKH dalam melaksanakan keuangannya. dilihat betul ini, kita ditonton ini, oleh banyak orang. Pertama itu.

Yang kedua, ini adalah merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh BPKH. Konsekuensinya seperti ini, gitu, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dijalankan. Nah bagaimana ke depannya kita rapat lagi, *next meeting* kita putuskan.

Begitu *Iho* Pak, pendapat saya.
Terima kasih Pak.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Mungkin izin Pak, memperkaya Pak.

Untuk yang tadi Pak Marwan sampaikan itu memang di 2019 pun ada Keppresnya, Pak. Prinsipnya begini Pak, kami siap pada prinsipnya untuk melakukan eksekusi, selama landasan hukumnya memang ada Pak. Jadi kalau misalnya ada Keppresnya, kita siap Pak, intinya itu.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kan nanti Keppresnya dari Pemerintah. Dan kalau memang itu diperlukan kenapa tidak.

Oke, cukup ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H):

Pemerintah sanggup kan?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tadi sudah kan,

“Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan dari Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai usulan tambahan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp288.312.382.288.- yang dialokasikan untuk anggaran tambahan kuota haji reguler 1444 Hijriah/2023 *Milladiah* sebanyak 7.360 jama’ah”.

Sudah ya, setuju itu ya.

Yang kedua, “Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin ke 1”.

Nah selanjutnya, apakah tidak ada poin lagi? biar mempertegas?. Perlu kan.

Coba dimunculkan tadi poin yang ketiga tadi.
Karena kalau tidak, Bapak kami panggil lagi besok.

“Komisi VIII telah mendengarkan penjelasan”, BPKH saja ya, institusi, penjelasan BPKH.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jangan ”kesanggupan”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Bukan “kesanggupan”. “Ketersediaan”, apa bagaimana *ya?*, ‘Ketersediaan dana untuk’.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“Kesiapan”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Kesiapan mengenai”.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“kesiapan anggaran”, “penggunaan” *ya*, “kesiapan penggunaan”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Anggaran”.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“Penggunaan nilai manfaat”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Nilai manfaat”.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak pakai “anggaran” lagi, langsung “nilai manfaat”, “untuk”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Mensubsidi”, apa istilahnya ya.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“Untuk”, jangan “mensubsidi”, tidak ada istilah “subsidi”, “untuk”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Ketersediaan penggunaan nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan kuota tambahan”.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“Kuota tambahan reguler”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Kuota tambahan jama’ah haji reguler sebanyak 8.000”.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jangan “8.000”, “reguler sebagaimana poin”

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

“Sebagaimana poin 1 di atas” ya. Iya betul.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Harus disebutkan “tidak mengganggu proses keuangan haji”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kan mendengarkan penjelasan BPKH mengenai kesiapan, itu artinya kan dia sanggup kan?, dan itu tidak mengganggu. Itu pasti tidak mengganggu kan?, karena kalau dikatakan “tidak mengganggu” kan, inikan sangat fluktuatif Pak, iya. Jama’ah itu saja sebanyak 7.360 jama’ah, titik. Tahunnya saja kau tambah. Jama’ah haji, calon jamaah haji.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Perdebatan kita, Pak John.
Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan persoalan uangnya ada atau tidak sekarang. Uangnya ada. Yang kita pertanyakan itu adalah uangnya ada dan keberlangsungan, jadi harus disebut di situ, bahwa ke penjelasan BPKH, bahwa tanpa mengganggu keberlangsungan keuangan haji.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jangan istilahnya mengganggu.
Ini saja, “dengan memperhatikan”.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H):

“dengan memperhatikan keberlangsungan”.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Iya, keberlangsungan. Keberlangsungan

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bukan “pengelolaan”. Kalau “pengelolaan” bisa saja dikelola.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

“keberlangsungan keuangan haji”.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Ya “keberlangsungan”.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

“keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang”.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Bagaimana Pak Fadlul, setuju dengan poin ini?.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Bismillaah Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

*Bismillaah, oke.
Poin selanjutnya?,
Pak Dirjen?.*

ANGGOTA (.....):

Pak Ketua, sebelum Keppres, itu tidak perlu?.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Tidak usahlah.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tidak usah.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Kalau kita tidak. BPKH nya saja.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Pemerintah nanti yang keluarkan Keppres. Tidak mungkinlah Pak.

Saya kira Bapak juga tidak berani mengeluarkan uang kalau tidak ada Keppres, saya tidak yakin itu. Mana Bapak berani mengeluarkan duit kalau tidak ada Keppresnya.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin Pak.

Jadi sesuai dengan tadi arahan Pak Ketua bahwa kami tidak akan, tidak berani mengeluarkan tanpa ada Keppres. Ini mungkin ada satu lagi Pak, di luar dari yang 288 untuk kouca, kuota 7.360, itu ada yang 232 jama'ah lunas tunda, Pak, itu apakah perlu di *stated* di sini?, atau hanya nanti di Keppresnya saja yang akan di...

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Karena itukan sudah kita serahkan kemarin Pak, kita sudah apa namanya?, di Raker kemarin kami sudah bicarakan bahwa karena itu. Kan sebenarnya begini Pak, kemarin itukan hanya karena salah hitung kan, tidak ada yang berubah. BPIH nya tidak berubah, BIPIH nya tidak berubah. Hanya bertambah, dan faktanya memang seperti itu, jadi saya kira tidak ada masalah menurut kami itu.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Jadi mungkin nanti dituangkan di dalam Keppres saja Pak, termasuk di dalamnya yang 288 ya Pak ya?.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kalau Keppres silakan.
Tapi bukan di sini.
Oke ya pak ya?.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Soal Keppres itu tetap harus kita dorong, Pak Pimpinan, karena perubahan Keppres dari nomor 5 ke nomor 8 di tahun kemarin itu, itu salah satunya memang pertimbangannya, pertimbangan kalau tidak dipenuhi. Kalau Keppres tidak turun maka kita tidak berangkat. Inikan persoalannya tidak ada yang, terserah saja, yang 8.000 kalau tidak diambil tidak masalah. Itu yang harus agar rasional juga, artinya kita harus memastikan juga, terutama dari penyelenggara PHU, yang poin pertama kita menyetujui 8.000 kita ambil, itu yang pertama.

Poin kedua, BPKH siap tanpa mengganggu proses selanjutnya. Tapi poin ketiga kita harus yakinkan proses ini berjalan, tanpa harus mengganggu skema yang sudah dibikin oleh PHU selama ini. Jadi jangan sampai kita sudah umumkan ini, Keppres sudah jalan. Persoalannya jadi dua, kalau Keppres tidak turun bagaimana?. Yang kedua, kalau Keppres turun tapi kita

tidak bisa menyelenggarakan itu bagaimana?. Seperti keprihatinan saya tadi, 20 kloter itu lumayan *lho*, dan lain sebagainya. Itu yang perlu besok dipastikan dalam rapat dengan Menag, bahwa Dirjen PHU siap melakukan itu, itu penting, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Saya kira salah satu poin yang akan kita bicarakan besok terkait masalah kesiapan 19 kloter itu, saya sudah dapat informasinya itu sudah di distribusi pak ke daerah. Tinggal menunggu kepastian berapa sebenarnya?. Kalau hanya lisan kan belum jelas.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin, Pimpinan.
Anggota kami ada yang ingin menyampaikan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Silakan Pak.

ANGGOTA BPKH:

Tadi Pak Kyai Maman mengingatkan kita, bahwa DPR menyetujui untuk mengambil kuota 8.000 itu sepertinya harus ada tertuang di sini, mohon izin.

Betul Pak Kyai ya. Karena ini yang paling penting sebenarnya buat kami.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Kemarin dengan Kementerian Agama sudah.
Dan besok itu keputusannya Pak, penegasannya itu besok.

ANGGOTA BPKH:

Kalau tiba-tiba muncul apa?, angka 288 itu kuota dari mana?, ini yang kami ingin, dari 8.000 kali itu kalau memang boleh.

Itu pasti besok muncul lagi di raker dengan Kementerian Agama, poin-poin ini akan ada yang berulang Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Yang Bapak persoalkan apanya?.

ANGGOTA BPKH:

Yang 7.360 itu mau diterima oleh DPR RI untuk kuota regular, ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.):

Pak, dibaca dari nomor 1 Pak, sudah ada itu.
Kalau seumpamanya ini *double* ini.

ANGGOTA BPKH:

“menerima penjelasan” atau “menerima kuota tambahan?”

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Menerima itu.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Putusannya besok Pak ya.

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (FADLUL IMANSYAH):

Izin Pak, mengkonfirmasi Pak.

Inikan di keputusan RDP tanggal 15 Februari Nomor 9 huruf I, itu ada yang kami, di halaman 11 ini, ini apakah perlu, mohon arahnya Pak, apakah ini perlu *dianulir*?, di revisi?, dikoreksi?, atau seperti apa?, mohon Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tidak bisa Pak.

Cuma kan itu otomatis tidak berlaku karena bertentangan dengan PMA sendiri itu, PMA tahun 2021 itu.

04.03.05

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Tidak bisa diberlakukan. Keputusan ini tidak salah.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tidak bisa diberlakukan.

ANGGOTA BPKH:

Pak Ketua, Pak Marwan, mohon maaf saja.
Mohon izin, Pak Ketua.

Ini sebenarnya kita untukantisipasi saja Pak, karena nanti proses pembayaran biaya haji yang dikeluarkan oleh BPKH inikan obyek audit, jadi semua pengeluaran yang kita berikan, yang kita transfer ke Kementerian Agama, itu pasti akan dipertanyakan basisnya.

Nah khawa..., kami agak khawatir kalau seandainya ada dua putusan berbeda, yang terkait dengan kuota tambahan. Jadi kalau seandainya Bapak-bapak mengatakan putusan 15 Februari tidak bisa di eksekusi, karena bertentangan dengan ketentuan lainnya mungkin harus di *stated* juga itu Pak. Karena kami tidak bisa menjelaskan itu nanti ke auditor, siapa yang berhak memberikan tafsir soal itu?, iya pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Betul

Tapi saya kira besok pak, dalam pengambilan keputusan itu kita masukkan itu.

ANGGOTA BPKH:

Tapi, izin, kami kan tidak ikut besok Pak.
Ikut? *Oh* ikut.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Ikut, Bapak ikut, saya undang Pak.
Oke ya pak ya, ada tambahan dari Pak Dirjen?, cukup?, cukup ya.

Demikianlah beberapa, apa, saya lupa tadi ini.
Tidak ada lagi?, masih ada?
Ya?, Sudah?, yas

F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.AG., S.H., M.H.):

Jadi yang nomor 4 itukan “menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji jama'ah kuota haji reguler tambahan”. *Oh* ya “tambahan”.

Oke Pak, tadi saya tidak baca “tambahan” nya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Sebetulnya iya, untuk manasik untuk kuota tambahan ini tidak mungkin dilaksanakan.

Jadi nanti anggarannya akan berakibat *loh* Pak. Jadi andaikan kita setuju anggarannya itu ada manasik, manasiknya pasti tidak bisa dilakukan. Jadi sebetulnya maksud poin ke 4 itu tidak perlu ada manasik, tinggal berangkat saja. Jadi akibatnya nanti BPKH harus menghitung ulang, jadi anggarannya tidak termasuk didalamnya manasik. Jadi manasik dikeluarkan.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Tunggu dulu Pak, kita dengar dulu dari Dirjen PHU terkait masalah manasik ini, kira-kira bisa terlaksana tidak ini?, yang poin 4 itu?.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Manasik 2 kali masih bisa Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Masih bisa *ya*.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI (PROF. HILMAN LATIEF, MA, PH.D.):

Kuota tambahannya.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Masih bisa.

Kalau pengalaman di lapangan Pak Pimpinan, saya lihat bisa. Kadang-kadang manasik satu Kabupaten dua kali sehari.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Ya tapi ini sudah berangkat pemberangkatan *lho* Pak.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Ya, ya, ya itukan kloter pertama. Inikan mungkin masuk pada gelombang kedua kan nanti tahapan berikutnya ini *ya, oke?*

Dari pada nanti mereka menuntut lagi “*kok* kami tidak ada manasik?, kami juga sudah bayar apa segala kan”, itu persoalannya memang.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Kalau tidak ada manasik, jangan kita bayar.

KETUA RAPAT (DRS, H. ASHABUL KAHFI, M.AG./KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PAN):

Oke, setuju semua ya Pak ya?
Tidak ada lagi?.

Baiklah, marilah kita bersama-sama menutup rapat ini dengan membaca *alhamdulillahirobbil'aalamiin*.

*Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.
Walloohulmuaafiq illaa aqwaamiththooriq.
Nashrumminallooh wa fathun qorrib, wabasysyiril mu'miniin.
Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh.*

**(RAPAT DI TUTUP PUKUL 18.56 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 22 Mei 2023
**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Mc, Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
NIP. 1971062420000310003